

LAPORAN PENELITIAN

## Voters Abstention Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Studi Kasus Ketidakhadiran Pemilih dalam Pilkada 2018 di Kota Medan

HIBAH RISET FISIPOL UGM 2018

(Skema Triple-Helix)



Tim Peneliti:

Arya Budi, M.A.

Derajad S. Widhyharto, M.Si.

Desi Rahmawati, M.A.

Arga Pribadi Imawan, S.I.P

Norin Mustika Rahadiri Abheseka, S.I.P

Mitra Kerjasama:

KPUD Kota Medan

JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA  
YOGYAKARTA 2018

## Daftar Isi

<b>Sinopsis.....</b>	<b>ii</b>
<b>Bab 1. Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1. <i>Latar Belakang</i>	1
2. <i>Tinjauan Pustaka</i>	3
3. <i>Metode Penelitian</i>	8
<b>Bab 2. Konteks Pemilih dan Kepemiluan Kota Medan .....</b>	<b>14</b>
1. <i>Konteks Pemilih Kota Medan</i>	14
2. <i>Riwayat Kepemiluan Kota Medan</i>	16
<b>Bab 3. Dimensi Behavioral sebagai Argumen Perilaku Pemilih.....</b>	<b>22</b>
1. <i>PTD: Demografi Penduduk Kota Medan</i>	22
2. <i>PTD: Rasional, Partisipasi &amp; Tingkat Kepercayaan</i>	24
3. <i>Menguji Perilaku Tidak Memilih (Abstention Voting)</i>	27
4. <i>Variabel Evaluatif</i>	30
5. <i>Perilaku Tidak Memilih</i>	32
<b>Bab 4. Dimensi Institusional sebagai Penjelas Keberadaan Voters Abstention.....</b>	<b>40</b>
1. <i>Administrasi dan Teknis Kepemiluan</i>	40
2. <i>Aspek Kandidasi Pasangan Calon</i>	52
3. <i>Aktivisme sebagai Penjelas dari Abstention</i>	59
4. <i>Penutup</i>	64
<b>Bab 5. Kesimpulan dan Rekomendasi.....</b>	<b>67</b>
1. <i>Kesimpulan</i>	67
2. <i>Rekomendasi</i>	69
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>71</b>

# Sinopsis

*Voters abstention* atau disebut sebagai ketidakhadiran pemilih dalam pemungutan suara merupakan fenomena global dan sering terjadi di setiap pemilihan umum. Tingginya *voters abstention* telah lama menjadi *concern* banyak negara mengingat potensinya yang dapat melemahkan legitimasi pemerintahan yang dibentuk oleh pemenang pemilu. Hasil kajian di beberapa negara lain menemukan bahwa penyebab tingginya *voters abstention* adalah: (1) sistem, kelembagaan, dan teknis pemilu; (2) keraguan pemilih terhadap kemanfaatan yang dapat mereka terima; serta (3) ketidakpedulian dan apatisisme pemilih. Berdasarkan hal tersebut, kajian ini ingin menjawab apa yang menjelaskan tinggi/rendahnya angka ketidakhadiran pemilih (*voter abstention*) di Indonesia? Mengapa angka partisipasi bisa sangat rendah dalam sebuah pemilu dan pada konteks daerah tertentu?

Untuk menjawab puzzle tersebut, kajian ini mengambil lokus Kota Medan dengan konteks pemilihan gubernur pada Pilkada serentak 2018. Pemilihan Kota Medan disebabkan pada tren meroketnya *voters abstention* dalam beberapa penyelenggaraan pemilu pasca dilaksanakannya pilkada langsung dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Titik klimaksnya terjadi pada pilwakot tahun 2015, yaitu mencapai 74,62%; atau, turunnya tingkat partisipasi yang menyebabkan hanya 25,38% pemilih di kota ini yang menggunakan haknya.

Secara metodologis, kajian ini menggunakan pendekatan studi kasus di Kota Medan dengan mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan mengambil 400 sample responden melalui survei *simple stratified random sampling* (Margin of Error  $\pm 5\%$  pada Confidence Interval 95%) terhadap populasi pemilih yang tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Medan pada saat Pilgub Sumut 2018. Populasi pemilih yang tidak datang ke TPS diperoleh melalui rekap lembar DPT yang dimiliki Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada setiap TPS yang terpilih.

Sementara itu, metode kualitatif diarahkan untuk memperoleh pandangan/informasi dari para penyelenggara, pengawas, dan peserta pemilu maupun stakeholder pemilu lainnya. Dengan skema *triple helix* kami, tim peneliti FISIPOL UGM, bekerja sama dengan KPU Kota Medan dan JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat). Pengambilan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara kepada: tim sukses kandidat gubernur, relawan, NGO, tokoh masyarakat dari kedua belah pihak yang berkompetisi. Berdasarkan data yang kami temukan dan analisis yang kami lakukan, kami berargumen bahwa ada dua alasan penting yang menjelaskan tingginya *voters abstention*: institusi sosial-politik yang bekerja di masyarakat dan perilaku memilih warga. Secara institusional, tingginya (atau rendahnya) *voters abstention* dipengaruhi oleh pendataan pemilih (data daftar pemilih tetap -- DPT) dan sosialisasi (undangan) yang tidak dilakukan secara maksimal oleh lembaga penyelenggara

pemilu. Selain itu, faktor aktivisme seperti mobilisasi (bujukan dari keluarga atau lingkungan) turut mempengaruhi terhadap lahirnya *voters abstention*.

Sedangkan secara behavioral, dari beberapa *hypothetical arguments* yang kami rujuk dari literature, temuan riset menunjukkan bahwa beberapa variabel rasional atau 'biaya' partisipasi; variable evaluatif seperti tingkat kepercayaan/kepuasan terhadap inkamben, aspek asosiasi sosial pemilih, informasi dan kampanye yang diterima pemilih, hingga aspek teknis-administrasi mempunyai pengaruh, berdasarkan analisis uji signifikansi Pearson's Chi-square  $P < 0.05$ , terhadap ketidakhadiran pemilih. Argumen dan temuan pada penelitian ini menjadi pintu masuk untuk menyentuh dua hal. Pertama, bagaimana perbaikan administrasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dilakukan. Kedua, kondisi sosial ekonomi dan kualitas performa kerja pemerintahan hasil pemilih menjadi evaluasi dan refleksi para elit dan pemangku kebijakan.

# Bab 1. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang

Saat ini banyak negara demokrasi tengah menghadapi persoalan rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Hal ini menimbulkan keprihatinan mengingat partisipasi telah lama disepakati oleh penganut teori klasik maupun modern sebagai aspek paling penting dari demokrasi (i.e. Pateman 1970; della Porta 2013). Walaupun diskusi mengenai isu ini telah berkembang melampaui isu-isu kepemiluan (i.e. Törnquist, Webster & Stokke eds. 2009), namun dalam konteks demokrasi elektoral, partisipasi pemilih masih memegang peranan penting (i.e. Dahl 1971 dalam Beetham 1994). Partisipasi tidak saja merefleksikan perlunya jaminan terhadap hak memilih (i.e. Keyssar 2001; Saward 1994; O'Donnell 2004), namun hal ini juga menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan isu representasi dan kepercayaan warga negara (i.e. Carothers, 2002; Adler & Hall, 2013).

Turunnya tingkat partisipasi pemilih, oleh karenanya, mendatangkan kegelisahan tersendiri. Lijpart (1997; 1998) menuliskan bahwa tren menurunnya partisipasi perlu diwaspadai karena hal ini mengindikasikan adanya pengaruh politik yang tidak merata. Sekalipun ia merefleksikan fenomena di Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa, namun negara demokrasi yang relatif baru seperti Indonesia juga mengalami hal serupa. Dengan tingkat partisipasi pemilih saat pemilu legislatif 2014 yang cukup tinggi yaitu sebesar 75%, Indonesia hanya menempati peringkat ke-61 atau jauh tertinggal dari negara-negara lain di Asia Tenggara yang juga menerapkan voluntary voting yaitu Filipina dan Malaysia (International IDEA, 2016).

Tidak hanya itu, realita menurunnya tingkat partisipasi atau naiknya tingkat ketidakhadiran pemilih (voter abstention) tampak dari pemilu-pemilu setelahnya. Saat Pilpres 2014, ketika KPU menargetkan tingkat partisipasi sebesar 75%, dalam realitanya, rata-rata tingkat partisipasi pemilih di seluruh Indonesia hanya mencapai 72%. Dengan kata lain, tingkat ketidakhadiran pemilih di TPS (abstention) mencapai 28%. Hal itu belum termasuk jumlah pemilih yang diperkirakan dengan sengaja menjadikan surat suaranya tidak sah (PolGov, 2016).

Merosotnya tingkat partisipasi pemilih tersebut tampak ironis di tengah sejumlah langkah yang telah dilakukan oleh KPU demi mendorong peningkatan partisipasi pemilih. Jika sejak 2014 KPU telah menciptakan skema-skema seperti DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dan DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) untuk mengatasi sulitnya verifikasi dalam penyusunan Daftar Pemilu Tetap (DPT), sejak 2015 KPU telah menerapkan pilkada serentak. Namun, skema yang dirancang untuk mengurangi intensitas pemilu sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat warga negara untuk menggunakan hak pilihnya ini (i.e. Lijphart, 1997; 1998) ternyata belum efektif. Tahun 2015 ketika pilkada untuk pertama kalinya diselenggarakan secara

serentak di 206 daerah (provinsi, kabupaten, kota), rata-rata tingkat partisipasi (Voter Turnout/VTO) hanya mencapai 64,02%. Dengan kata lain; rata-rata tingkat pemilih yang tidak hadir di TPS (abstain) mencapai 35,98%. Walaupun, pada tahun 2017 rata-rata VTO dalam pilkada serentak di 101 daerah naik menjadi 74,5% (abstention turun menjadi 25,5%), namun hal yang sama belum tentu terjadi di tahun 2018, ketika pilkada serentak diagendakan untuk dilaksanakan di 191 daerah. Hal ini karena sejumlah daerah yang akan berhadapan dengan pilkada serentak tahun 2018 masih memiliki problema tren rendahnya VTO atau tingginya voter abstention dalam pemilu-pemilu yang diselenggarakan beberapa tahun terakhir.

Contoh yang paling ekstrim adalah Kota Medan. Jika dalam pemilu nasional tahun 2014, tingkat ketidakhadiran pemilih di kota ini mencapai 46,50% (pemilu legislatif) dan 41,50% (pemilu presiden), tidak demikian halnya dengan capaian saat pemilu kepala daerah. Satu tahun sebelum pemilu nasional, tepatnya saat pilkada gubernur tahun 2013, tingkat partisipasi di kota ini sangat rendah yaitu hanya 36,62%. Dengan kata lain, tingkat abstainnya pemilih saat itu mencapai 63,38%. Sementara itu pada pilkada walikota tahun 2015, angka partisipasi anjlok hingga titik 25,38%; atau dengan kata lain, tingkat abstention melonjak hingga 74,62%.

Realita semacam ini mengundang pertanyaan: mengapa banyak pemilih memutuskan untuk abstain atau tidak menggunakan haknya dalam pemilu? Apa faktor atau penyebab yang dapat menjelaskan hal ini? Apakah hal ini masih mungkin terjadi saat pilkada serentak tahun 2018, atau bahkan saat pileg dan pilpres tahun 2019? Sejauh mana jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat memberikan kontribusi kepada penyelenggara pemilu untuk membuat terobosan yang efektif guna meningkatkan partisipasi di daerah dengan performa pemilih demikian? Sejauh apa hal ini bisa menyumbangkan pemikiran dalam dunia akademik?

Dalam khasanah literatur, tidak sedikit studi mencoba menjelaskan tentang penyebab dari abstention. Misalnya saja, studi-studi yang melihat bahwa tingkat abstention dipengaruhi oleh sistem pemilu. Dalam hal ini, sistem proporsional dianggap lebih mengakomodir pemilih (i.e. Blais 2006; Lijphart 1997, 1998). Ada pula tulisan yang melihat bahwa rendahnya partisipasi atau tingginya abstention terjadi karena ketidaktertarikan pemilih terhadap kandidat-kandidat peserta pemilu. Rendahnya keunikan yang dapat ditampilkan para kandidat (candidate contrast) menyebabkan para pemilih memutuskan untuk abstain dalam pemilu (Highton, 2010). Selain itu, sejumlah penelitian lain lebih menyoroti hubungan antara abstention dengan persoalan-persoalan teknis kepemiluan yang menyulitkan pemilih (i.e. Kang, 2004; Freixas & Zwicker, 2003), ketidakpedulian pemilih terhadap pemilu (i.e. Adams, Dow, & Merrill III, 2006), ketidakpercayaan mereka terhadap partai pemerintah (i.e. Delwit, 2013), kekecewaan pada performa ekonomi yang dicapai oleh pemerintah atau pemenang pemilu (i.e. Tillman, 2008), efek pemilu bagi kepentingan pemilih (i.e. Palfrey & Rosenthal, 1985) hingga keberatan-keberatan yang berkaitan dengan pertimbangan pemilih tentang untung-rugi yang mereka dapatkan jika hadir/tidak hadir ke TPS (Downs, 1995). Studi-studi tentang voter abstention bahkan telah merambah ranah perdebatan tentang apakah keberadaan voter abstention,

terutama dalam konteks sistem pemilu yang kurang demokratis, harus dimaklumi; dan seperti halnya partisipasi, abstention perlu dilihat sebagai bagian dari hak warga negara (i.e. Hanna, 2009).

Apapun hasil studi yang telah dilakukan dengan berpijak pada realita di banyak negara lain belum tentu dapat menjelaskan realita sejenis di Indonesia. Di tengah langkanya studi tentang voter abstention di tanah air, pada sisi lain kecenderungan meningkatnya voter abstention dalam pemilu-pemilu di Indonesia, perlu dilakukan penelitian guna mengetahui aspek-aspek kunci yang dapat direkomendasikan kepada penyelenggara pemilu. Hal ini agar kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mendongkrak minat pemilih dalam menggunakan haknya menjadi efektif dan tingkat representasi atau bahkan legitimasi pemerintah menjadi meningkat. Dalam upaya ini, kemunculan tren voter abstention yang ekstrim di Kota Medan selama beberapa tahun terakhir menghadirkan relevansi yang kuat untuk dilakukannya penelitian di daerah ini. Terlebih, pada tahun 2018 ini, Kota Medan menjadi salah satu daerah dimana Pilkada Gubernur Sumatera Utara akan digelar. Sehingga, penelitian di daerah ini berpotensi untuk menguak alasan para pemilih untuk tidak hadir saat pilkada tahun 2018. Potensi untuk dapat merunut alasan para pemilih untuk tidak hadir dalam pemilu-pemilu sebelumnya juga berpeluang menghasilkan penjelasan dan pijakan bagi rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan isu peningkatan partisipasi dan penguatan representasi/legitimasi hasil pemilu.

Berangkat dari latar belakang di atas, tulisan ini berusaha untuk menjelaskan tinggi/rendahnya angka ketidakhadiran pemilih (*voter abstention*) di Indonesia khususnya dalam konteks Kota Medan. Pemilihan Kota Medan dengan pertimbangan pada tren meroketnya *voters abstention* dalam beberapa penyelenggaraan pemilu pasca dilaksanakannya pilkada langsung dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Titik klimaksnya terjadi pada pilwakot tahun 2015, yaitu mencapai 74,62%; atau, turunnya tingkat partisipasi yang menyebabkan hanya 25,38% pemilih di kota ini yang menggunakan haknya.

## **2. Tinjauan Pustaka**

Sebagaimana diindikasikan dalam latar belakang, tren penurunan partisipasi dan peningkatan voter abstention telah menghadirkan kerisauan. Isu legitimasi hasil pemilu dan tingkat kepercayaan warga negara terhadap pemerintahan yang dibentuk oleh pemenang pemilu menjadi concern utama mengapa abstention menjadi penting. Karena itu, penyelenggara pemilih di banyak negara, termasuk Indonesia telah mengupayakan berbagai strategi untuk memperbaiki pelembagaan penyelenggaraan pemilu demi menekan angka abstention, walaupun belum sepenuhnya efektif. Hal ini lah yang mendorong dilakukannya banyak penelitian untuk menemukan akar persoalan abstention sebagai pijakan perumusan terobosan yang efektif.

Jika dikategorikan secara cepat, riset-riset yang telah dilakukan di negara-negara lain menemukan bahwa setidaknya terdapat tiga penyebab dari rendahnya partisipasi atau tingginya ketidakhadiran pemilih di hari pemungutan suara. Masing-masing penyebab memiliki penjelasan yang beragam sebagaimana terlihat dari penjabaran tiga poin di bawah ini.

## 2.1. Sistem, Pelembagaan, dan Teknis Pemilu sebagai Penjelaras Atas Voter

Dalam referensi akademik, permasalahan ketidakhadiran pemilih dalam pemilu dikaitkan dengan banyak isu, misalnya, voting behavior dan sistem elektoral. Sistem pemilu proporsional (proportional representation atau PR), dibandingkan dengan sistem majoritarian, seringkali dianggap lebih berkontribusi pada tingginya angka partisipasi pemilih atau turnout atau rendahnya ketidakhadiran pemilih di negara-negara demokrasi mapan. Hal ini karena sistem PR menghasilkan lebih banyak partai sehingga pilihan pemilih lebih terakomodasi (lihat misalnya, Blais dan Aarts 2006). Hal yang sama terjadi pada negara-negara yang menerapkan sistem mandatory atau compulsory voting. Walaupun logika kewajiban partisipasi warga negara berbeda dengan logika penerapan sistem pemilu yang membuka peluang bagi munculnya banyak alternatif partai (PR), namun kewajiban bagi warga negara untuk menggunakan hak pilih juga efektif dalam mendongkrak angka partisipasi dan menekan jumlah abstention (Delwitt, 2013).

Hal yang berbeda terjadi pada situasi dimana penerapan banyak aturan dan administrasi yang rumit justru menghasilkan jumlah partai yang terbatas sehingga pemilih merasa hanya dihadapkan pada dua opsi, yaitu memilih partai yang tidak sesuai dengan harapannya, atau sebaliknya, menjadi abstain (Kang, 2004). Dalam konteks ini, abstention dikaitkan dengan protest voting, dimana, keputusan pemilih untuk abstain dalam pemilu justru dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk menunjukkan protes (Kang, 2004). Temuan ini dalam beberapa hal sejalan dengan riset lain yang dilakukan terhadap dua belas pemilihan legislatif di Brazil (antara tahun 1945 dan 1990) yang mengungkapkan bahwa keberadaan abstention (dan surat suara tidak sah) terkait dengan faktor pelembagaan pemilu, yang antara lain tampak dari proses pemilihan yang rumit dan digunakannya sistem multi-partai (Power & Roberts, 1995). Walaupun studi ini menampik keterkaitan antara abstention dengan protes pemilih maupun faktor-faktor lain yang terkait dengan struktur sosial pemilih (misalnya tingkat pendidikan dan ekonomi), namun studi ini tidak benar-benar mengabaikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mengaitkan antara abstention dengan tiadanya kewajiban memilih (compulsory voting) serta kecurangan pemilu yang kerap terjadi di tahun 1960an, dimana pihak-pihak yang mewakili kandidat kerap mendatangi para pemilih yang hadir di tempat pemberian suara serta membagikan surat suara yang telah mereka cetak dan selesaikan sendiri (Power & Roberts, 1995).

Pandangan dan strategi lain ditawarkan oleh Lijpart (1997; 1998) yang melihat bahwa trend tingginya angka abstention mengindikasikan adanya pengaruh politik yang tidak merata sehingga memerlukan solusi berupa perbaikan mekanisme institusional pemilihan termasuk: penerapan representasi proporsional, penyelenggaraan pemilu serentak untuk mengurangi tingkat keseringan pelaksanaan pemilu, kewajiban pemilu, dan pelaksanaan pemilu di akhir pekan.

Dalam kaitannya dengan pelembagaan pemilu, keberadaan voter juga masih dikaitkan dengan alasan-alasan teknis. Seperti misalnya, kesulitan geografis yang menyebabkan sulitnya akses pemilih ke lokasi pemberian suara (Lima 1990 dalam Power & Roberts 1995) serta tidak tersedianya TPS di tempat-tempat khusus seperti rumah sakit (Freixas & Zwicker, 2003). Alasan-alasan teknis semacam ini dalam kenyataannya juga dikaitkan dengan pertimbangan rasional mereka tentang biaya ekonomi maupun waktu (Downs, 1957). Semakin murah biaya yang pemilih keluarkan untuk mencapai TPS (misalnya untuk transportasi dan lain sebagainya) akan membuat mereka memutuskan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Sementara itu, waktu menjadi pertimbangan penting bagi pemilih karena pemilu (di sejumlah negara) banyak menuntut para pemilih untuk meluangkan waktu baik untuk proses mendaftar pemilu, memilih partai yang sesuai, pergi ke TPS, dan kemudian menandai surat suara. Para pemilih yang memiliki pertimbangan rasionalitas semacam ini biasanya tidak mepedulikan hasil pemilu (siapa yang menang dan siapa yang kalah) karena mereka merasa tidak akan mendapatkan keuntungan dari proses maupun hasil pemungutan suara. Sehingga, jikalau para kandidat berusaha memperebutkan suara mereka, hal itu tidak akan terlalu efektif karena pertimbangan mereka yang utama untuk hadir/tidak hadir adalah karena rasionalitas seperti di atas.

## 2.2. Keraguan Terhadap Manfaat Pemilu

Abstainnya pemilih juga dikaitkan dengan paradoks pemilu (Palfrey & Rosenthal, 1985) merupakan salah satu yang mendukung ini. Mereka melihat bahwa ada. Di satu sisi, sistem demokrasi menginginkan adanya partisipasi pemilih yang besar, namun pada sisi lain, pemilih kerap dihadapkan pada ketidakpastian yang berpotensi menjadikannya urung untuk memanfaatkan hak memilih. Misalnya saja mereka merasa tidak yakin tentang seperti apakah kebijakan yang dibuat oleh pemenang pemilu. Kedua, mereka tidak mengetahui apakah warga negara lain akan memilih atau abstain terutama dalam konteks dimana tidak ada kewajiban dalam pemilu. Dan ketiga, mereka tidak cukup mengetahui tentang biaya pemungutan suara dan preferensi pemilih lainnya.

Dalam situasi yang demikian, hasil riset Palfrey & Rosenthal (1985) menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih yang merasa ragu-ragu (dengan pertimbangan di atas) akan memilih untuk abstain. Namun, mereka yang masih melihat potensi

keuntungan/kerugian yang sama akan cenderung ikut berpartisipasi. Penelitian ini merekomendasikan para kandidat untuk aktif dalam mendekati para pemilih, termasuk dengan cara membantu mereka untuk sampai ke lokasi TPS. Namun demikian, riset ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek yang sangat teknis, tanpa mengaitkan hasil rekomendasinya dengan kemungkinan benturan dengan isu lain seperti politik uang ataupun mobilisasi pemilih yang tidak selalu produktif dalam mendukung demokrasi.

### 2.3. Ketidakpedulian dan Apatisme

Karena itu, ketidakhadiran pemilih dalam pemungutan suara juga dikaitkan dengan ketidakpedulian atau bahkan apatisme pemilih. Dalam kaitannya dengan ketidakpedulian terhadap pemilu, hal-hal sederhana seperti keengganan warga negara untuk diidentifikasi merupakan indikasi awal dari penolakan mereka untuk terlibat dalam aturan main pemilu (Freixas & Zwicker, 2003). Hal-hal yang terkait dengan minimnya sosialisasi pemilu juga dapat berkontribusi terhadap ketidakpedulian pemilih untuk datang/tidak datang ke TPS di hari pemungutan suara. Ghirardato dan Katz (1995) merupakan sedikit peneliti yang mengaitkan antara voter dengan keterbatasan informasi yang dapat menjangkau lebih banyak pemilih. Semakin sedikit informasi yang didapatkan oleh pemilih, semakin besar kekhawatiran mereka untuk melakukan kesalahan dalam memilih. Tidak jarang, mereka merasa tidak mampu membuat keputusan yang bijaksana di dalam bilik suara (Matsusaka, 1993). Pemilih pada akhirnya memutuskan untuk abstain daripada harus menanggung beban psikologis karena telah memilih pemimpin yang salah (Ghirardato dan Katz, 1995). Riset yang sama juga menyimpulkan bahwa pemilih yang mendapatkan cukup informasi cenderung memutuskan untuk berpartisipasi. Dalam cerita ini, para pemilih secara rasional dan selektif memutuskan untuk abstain, tergantung pada banyak/sedikitnya informasi yang mereka peroleh terkait dengan calon-calon atau partai-partai peserta pemilu.

Persoalan ketidakpedulian pemilih terkadang dikontraskan dengan persoalan alienasi dari kandidat (Adams, Dow and Merrill III, 2006). Yaitu, situasi ketika para pemilih merasa tidak memiliki kedekatan dengan kandidat, termasuk secara ideologis. Pada situasi dimana pemilu mampu menghadirkan calon yang menarik, para pemilih yang mempermasalahakan alienasi ini dapat termotivasi untuk ikut pemilu. Namun, tidak demikian halnya dengan para pemilih yang mengaku tidak peduli terhadap pemilu. Mereka pada umumnya menganggap kandidat terlalu memaksakan kehendak, sehingga tampilnya calon yang menarik ataupun isu jarak ideologis tidak mengubah keputusan mereka untuk abstain. Tulisan yang sama juga merujuk beberapa temuan dari penelitian-an-penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya, yang melihat bahwa dalam konteks Amerika Serikat, alasan bagi voter dalam dua macam pemilu menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Abstain yang disebabkan oleh ketidakpedulian ternyata

lebih banyak muncul dalam pemilu presiden, sementara abstain yang disebabkan oleh tidak adanya kedekatan dengan kandidat lebih banyak muncul dalam pemilu senator. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilih memiliki persepsi yang berbeda terhadap level pemilu (dan harapan terhadap kandidat) sehingga mempengaruhi keputusan mereka untuk abstain atau hadir/berpartisipasi dalam pemilu.

Rasionalitas pemilih, dalam derajat yang lebih kuat, menghasilkan apatisme yang berujung pada abstainnya mereka dari proses pemungutan suara. Riset-riset dalam kerangka ini pada umumnya menegaskan bahwa ketidakhadiran pemilih bukan dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan dan struktur sosial masyarakat di suatu negara. Delwit (2013), dalam risetnya di 35 negara Eropa dan Amerika Utara pasca Perang Dunia II, secara tegas mengaitkan antara abstention, apatisme, dan kekecewaan terhadap performa pemerintah. Penelitiannya menunjukkan bahwa kecenderungan menurunnya partisipasi pemilih dalam pemilu yang banyak terjadi di kalangan pemuda dilatarbelakangi oleh kekecewaan mereka terhadap kinerja partai pemerintah atau partai sentripetal yang dianggap tidak dapat merepresentasikan kepentingan rakyat. Hal ini pada akhirnya melahirkan apatisme terhadap isu-isu, aktor-aktor politik, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan politik.

Dengan demikian, apa sebenarnya yang telah menyebabkan apatisme sehingga mendorong pemilih untuk abstain? Terdapat beberapa penjelasan untuk ini. Misalnya saja yang terkait dengan kepuasan pemilih terhadap performa pemerintah. Studi komparatif yang dilakukan oleh Tillman (2008) terhadap sistem elektoral di sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat (yang menyelenggarakan pemilu antara tahun 1996 hingga 2002) menemukan bahwa penilaian masyarakat terhadap performa pemerintah dalam bidang ekonomi menentukan pilihan mereka terhadap partai politik, juga keputusan mereka untuk hadir/tidak hadir dalam pemilu.

Tulisan lain melihat abstention dan apatisme dalam kaitannya dengan hak pemilih untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap proses pemilihan. Dalam perspektif ini, walaupun warga negara dibekali dengan hak pilih, namun hak ini semestinya tidak dipaksakan, terutama jika pemilih melihat adanya ketidakadilan dalam proses pemilu atau ketika mereka melihat bahwa pemilu tidak dapat memperbaiki sistem politik yang telah ada. Karena itu perspektif ini justru mengusulkan pentingnya mengubah konsep atau cara pandang dalam menyikapi abstainnya pemilih dalam pemungutan suara. Sehingga, dorongan untuk menekan angka abstention tidak kemudian menjadi jalan bagi pengabdian ketidakadilan (Hanna, 2009).

Temuan-temuan di atas menunjukkan ragam kemungkinan untuk menjelaskan kasus ekstrimnya tingkat voter abstention di Kota Medan. Atau lebih luas, temuan-temuan tersebut bisa jadi juga menjelaskan mengapa tren serupa muncul di salah satu daerah di Indonesia. Lebih dari itu, hal penting yang hendak digaris bawahi oleh penelitian ini adalah, jikalau temuan di Kota Medan memiliki kesamaan sebab dengan apa yang terjadi

di negara lain, hal ini memerlukan penjelasan lebih lanjut. Aspek kekhususan yang dapat ditarik dari studi kasus di Indonesia tingkat lokal akan lebih memberikan petunjuk agar kebijakan yang akan dibuat oleh penanggung jawab pemilu lebih kontekstual.

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1. Mixed-methods sebagai Metodologi

Untuk menjawab pertanyaan di atas, riset ini menggunakan metode penelitian campuran (*mixed method*), atau dalam bahasa sederhananya adalah gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Strategi ini dilakukan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks dengan merujuk pada interkoneksi yang dinamis sehingga memerlukan penggunaan gabungan antara dua metode riset (lihat misalnya Hesse-Biber 2010, hlm. 2). Sebagai konsekuensinya, riset dengan metode ini menerapkan teknik kombinasi mulai dari proses pengumpulan data, analisis, hingga integrasi laporan (Hesse-Biber 2010).

Dalam hal pengumpulan data, metode ini menuntut kombinasi data yang kaya, termasuk melibatkan data demografi, survey dan observasi, serta pemetaan sosial. Namun yang lebih krusial disini adalah menentukan sampling. Onwuegbuzie & Collins (2007) menyebutkan bahwa cara menentukan sampling untuk metode campuran ini sangat dipengaruhi oleh desain metodologi dan skema sampling.

Untuk desain metodologi, terdapat beberapa alternatif tipe yang dapat digunakan, yaitu tipe *triangulation*<sup>1</sup>, tipe *complementarity*, tipe *initiation*<sup>2</sup>, tipe *development*<sup>3</sup>, dan tipe *expansion*<sup>4</sup> (Onwuegbuzie & Collins, 2007; Greene, Caracelli, & Graham 1989 dalam Hesse-Biber, 2010). Penelitian ini memilih tipe *complementarity* karena tipe ini adalah tipe yang paling layak dilakukan di tengah situasi lapangan yang tidak memungkinkan dilakukannya penelitian dengan tipe yang direncanakan sebelumnya (tipe *initiation*). Perubahan strategi ini kemudian berimplikasi pada penempatan relasi antara metode

---

<sup>1</sup> Dalam tipe ini, metode kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk meneliti dimensi yang sama dari sebuah pertanyaan penelitian. Tipe ini digunakan untuk mencari konvergensi temuan, meningkatkan kredibilitas temuan dan memperkaya kesimpulan.

<sup>2</sup> Tipe ini digunakan untuk menganalisis paradox dan kontradiksi. Dalam tipe ini, penelitian dilakukan lebih dari satu tahapan, dimana tahapan pertama akan menghasilkan pertanyaan atau kontradiksi yang membutuhkan klarifikasi. Sehingga, studi yang kedua berfungsi untuk menambahkan *insight* terhadap fenomena yang tengah diteliti.

<sup>3</sup> Tipe ini menggunakan hasil dari metode yang pertama untuk membangun metode yang kedua. Sebagai contoh, jika sebuah riset awalnya dilakukan dengan metode kuantitatif, hasil survei akan digunakan sebagai petunjuk untuk membangun rancangan riset yang kedua (kualitatif). Atau sebaliknya, hasil riset kualitatif digunakan sebagai dasar untuk membangun agenda riset yang kedua (kuantitatif).

<sup>4</sup> Tipe ini bertujuan untuk mengembangkan keluasan dan kedalaman studi, serta menghasilkan temuan-temuan yang detail sehingga memancing kebutuhan riset selanjutnya.

kuantitatif dengan kualitatif, dimana, keduanya tidak disajikan secara sendiri-sendiri tetapi sebagai *cross-validation* ketika beberapa metode menghasilkan data yang sebanding. Pemilihan tipe ini juga berimplikasi pada penekanan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis aspek-aspek yang tumpang tindih dari sebuah fenomena sehingga berpeluang mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh.

Lebih lanjut, Onwuegbuzie & Collins (2007) juga memberikan alternatif bagi penentuan sampling bagi kedua metode yang berbeda ini. Mereka menekankan pada empat jenis relasi antara metode kuantitatif dan kualitatif, dimana pemilihan jenis relasi inilah yang nantinya dapat menentukan jenis sampling yang paling tepat. Jenis-jenis tersebut adalah, *pertama*, relasi yang identik, dimana sampel responden/informan bagi kedua metode riset adalah sama. *Kedua*, relasi yang paralel, dimana sampel responden/informan untuk kedua metode riset berbeda namun diambil dari satu populasi yang sama. *Ketiga*, relasi yang *nested*, yaitu ketika sampel untuk satu fase studi merepresentasikan bagian yang juga dipilih untuk tahapan riset yang lain. *Keempat*, relasi yang multilevel dimana sampel responden/informan dapat diambil dari level yang berbeda-beda guna memperkaya dimensi penjelasan. Pemilihan jenis ini dapat disesuaikan dengan tujuan riset.

Sejalan dengan tujuan riset, jenis relasi antara metode kuantitatif dan kualitatif yang dipilih untuk penelitian ini adalah jenis multilevel. Onwuegbuzie & Collins (2007) secara gamblang menggambarkan bagaimana bentuk relasi multilevel ini memungkinkan peneliti untuk mengambil sampel yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Mereka mencontohkan bahwa ketika fase kuantitatif peneliti memilih pelajar sebuah sekolah sebagai sampel, saat pelaksanaan fase kualitatif, peneliti dapat memilih sampel yang berbeda, yaitu guru, kepala sekolah, dan orang tua murid.

Tabel 1

Dasar Penentuan Sampel dari Kedua Metode (Kualitatif dan Kuantitatif)

Aspek		Implikasi
Desain Metodologi	Tipe <i>complementarity</i>	kuantitatif dengan kualitatif tidak berdiri sendiri tetapi sebagai <i>cross-validation</i> ketika masing-masing menghasilkan data yang sebanding.
Relasi antara metode kuantitatif dan kualitatif	Multilevel	sampel yang berbeda pada masing-masing metode guna memperkaya perspektif (temuan)

Selanjutnya, teknis pada masing-masing metode variasi teknis pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut. Pada fase riset yang dilakukan dengan metode kuantitatif, tim melakukan survey dengan menggunakan *multi-stage stratified random sampling* pada 400 responden. Sedangkan pada fase kualitatif, strategi yang digunakan adalah *non-random sampling* karena bertujuan untuk mendapatkan *insight* terhadap sebuah fenomena, individu, atau event. Strategi pengumpulan data yang berbeda ini kerap ini digunakan untuk komponen kualitatif dari studi mixed method (Onwuegbuzie & Collins, 2007)

### 3.2. Penggunaan Mixed-methods pada Teknis Pengumpulan Data

Secara teknis, agenda pencarian data dalam penelitian ini ditempuh melalui empat rangkaian kegiatan: desk study, pra penelitian lapangan (koordinasi dengan mitra), penelitian lapangan, dan proses pengolahan data. Mixed-methods sebagai metodologi terutama baru digunakan saat tahapan penelitian lapangan dan penyajian laporan hasil analisis data.

#### a) *Aktivitas Pra Penelitian Lapangan*

Pada tahapan desk study, dilakukan studi literatur, studi dokumen, dan penggalian informasi/data awal dari sumber-sumber media massa. Aktivitas ini bertujuan untuk menemukan teori-teori yang relevan, guna membantu menemukan kerangka pikir yang lebih tajam sebagai alat untuk melakukan analisis terhadap temuan. Aktivitas desk study juga akan dilakukan dengan cara menelaah hasil-hasil kajian yang pernah dilakukan sebelumnya. Termasuk, dokumen-dokumen KPU yang terkait dengan partisipasi pemilih dan sumber-sumber lain (misalnya yang tersedia di internet) sebagai pemetaan awal terhadap permasalahan yang akan dikaji.

Pada tahapan pra penelitian lapangan, terdapat dua kegiatan penting yang berjalan beriringan, yaitu koordinasi dengan lembaga mitra (KPU Medan dan JPPR) serta penyusunan instrumen lapangan (instrumen survei dan daftar wawancara). Koordinasi dengan mitra KPU dilakukan terutama untuk memastikan beberapa hal misalnya: kemudahan akses Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditandatangani setelah pemilihan selesai dilakukan, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan lain sebagainya. Sementara itu koordinasi dengan mitra LSM, dalam hal ini adalah JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) terutama dilakukan untuk memastikan perekrutan enumerator yang dengan beberapa kualifikasi standar sebagai berikut: enumerator lokal dengan jenjang pendidikan minimal mahasiswa S1 semester akhir dan memiliki kualifikasi teknis seperti kemampuan lapangan (akses transportasi dan wawasan terhadap TPS/Desa tujuan) dan komitmen kerja. Aktivitas lain dalam tahapan ini adalah penyusunan instrumen survei dan daftar pertanyaan wawancara

untuk kegiatan kualitatif (termasuk buku lapangan peneliti). Aktivitas ini sepenuhnya dilakukan oleh tim peneliti dari UGM dengan meminta masukan dari para mitra.

#### *b) Penelitian Lapangan*

Proses pengambilan data untuk riset ini telah dilakukan di Medan mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 8 Juli 2018. Dalam proses ini metode kuantitatif (survey) dilakukan terlebih dahulu dengan melibatkan sekitar 20 orang enumerator yang diterjunkan di 21 kecamatan di Kota Medan. Aktivitas ini menysasar 400 responden dari kalangan pemilih yang tidak hadir di TPS saat pemungutan suara (tidak menggunakan hak pilih). Aktivitas ini menggunakan basis data berupa daftar hadir pemilih di TPS yang dicocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Aktivitas yang mendapatkan dukungan dari KPU Sumatera Utara (sebagai tim pemantau pemilu) dan KPU Kota Medan ini direncanakan selesai dalam waktu 1 pekan. Namun, dalam realitanya, survey memerlukan waktu yang lebih panjang karena kendala lapangan, termasuk tidak ditemukannya banyak nama calon responden, yaitu mereka yang tercatat di DPT dan teridentifikasi tidak hadir di TPS dan mereka yang menolak diwawancarai karena alasan privasi. Pada fase kuantitatif ini terdapat tiga aktivitas penting, yaitu observasi dokumen, persiapan survey, dan pelaksanaan survey, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- *Observasi dokumen*

Sekalipun proses desk study sebagian besar dilakukan sebelum turun lapangan, namun dalam aktivitas riset yang akan mengambil sample responden dari kalangan mereka yang tidak hadir di TPS, maka telaah daftar peserta pemilu yang tidak hadir menjadi penting. Dalam hal ini, pada hari dimana pemungutan suara selesai dilakukan, tim akan meminta salinan informasi dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang memperlihatkan para responden yang tidak hadir di setiap TPS. Data ini menjadi bagian terpenting yang akan menjadi basis bagi tim peneliti yang dibantu enumerator untuk menentukan responden dari kalangan pemilih yang tidak hadir di TPS.

- *Persiapan survei*

Aktivitas ini meliputi koordinasi dengan para mitra dan pelatihan/workshop dengan para enumerator. Kegiatan ini penting, terutama untuk memberikan pembekalan teknis kepada para enumerator sebelum mereka bekerja menjalankan survei. Karena itu beberapa materi yang akan disampaikan pada pembekalan ini meliputi: desain besar

penelitian, teknik sampling dan alternatif-alternatifnya, teknik wawancara survei, serta keterampilan lapangan lainnya.

- Survei kepada pemilih yang tidak hadir di TPS

Riset lapangan untuk penelitian ini akan dilakukan dalam dua aktivitas pokok, yaitu: survei (kuantitatif) dan wawancara (kualitatif). Survei untuk mengetahui alasan ketidakhadiran pemilih akan dilakukan dengan menyasar kelompok responden yang merupakan para pemilih yang tidak hadir di TPS. Aktivitas yang akan dibantu pelaksanaannya oleh para enumerator ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan:

- ✓ Mengidentifikasi para pemilih yang tidak hadir di TPS dengan memanfaatkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimiliki oleh KPU Medan.
- ✓ Melakukan *sampling* secara acak pada TPS-TPS yang teridentifikasi memiliki pemilih yang abstain. Secara umum, target responden sementara ini ditentukan sebanyak 400 orang pemilih yang tidak hadir saat pemungutan suara. Para responden ini direncanakan berasal dari 40 TPS (masing-masing TPS tersebut akan diambil sebanyak 10 responden).
- ✓ Sebagai upaya agar perencanaan ini dapat berjalan dengan baik, para peneliti akan melakukan verifikasi dan *spot-checking* responden (baik langsung maupun melalui telepon) sebanyak 20% dari total 400 responden atau total kuesioner terkumpul. Jika jumlah sample terverifikasi kurang dari jumlah sample yang dibutuhkan dengan *margin of error 5%*, maka dilakukan pengambilan data ulang oleh enumerator untuk memenuhi standard sample survei.
- ✓ Tahap terakhir dari rangkaian survei ini adalah input dan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti. Dalam aktivitas ini, minimal 80% kuesioner dapat di-input ke dalam data numerik di Kota Medan. Peneliti melakukan pengolahan data frekuensi dan analisis data lainnya hingga pada penyajian data sebagai basis analisis penelitian secara keseluruhan termasuk dengan memperhatikan hasil penelitian kualitatif dan analisisnya.

- Fase kualitatif

Pada fase kualitatif, kegiatan yang dijalankan pada tanggal 2-8 Juli ini sejak awal diarahkan untuk memperoleh pandangan/informasi dari kelompok sampel yang berbeda. Dalam hal ini adalah para penyelenggara,

pengawas, dan peserta pemilu. Proses ini berhasil mewawancarai total lebih dari 20 orang informan, termasuk dari KPU Kota Medan, PPK/PPS Medan Barat, Medan Deli, Medan Maimun, representasi dari tim pemenang Paslon 1 dan Paslon 2, wartawan senior pada dua media massa lokal (Waspada dan Antara), LSM Pesada, akademisi, masyarakat umum, dan para enumerator survey. Fase kualitatif juga dilakukan dengan cara menyelenggarakan diskusi (FGD) yang dihadiri oleh akademisi, KPU Kota Medan (mitra riset ini), Bawaslu Sumatera Utara, media massa, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan LSM (dalam hal ini adalah JPPR yang merupakan mitra riset ini).

## Bab 2. Konteks Pemilih dan Kepemiluan Kota Medan

Dipilihnya Kota Medan sebagai lokus penelitian ini membuat kita perlu mendalami bagaimana gambaran umum pemilih dan konteks kepemiluan di Kota Medan. Bagian ini menjadi pintu masuk bagi analisis hasil temuan lapangan.

### 1. Konteks Pemilih Kota Medan

Sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan merupakan kawasan urban, kota perdagangan dan metropolitan terbesar di Pulau Sumatera. Kota dengan luas wilayah 265,10 km<sup>2</sup> (BPS 2017) ini setidaknya dihuni hampir 2.247.425 jiwa yang tersebar kedalam 21 kecamatan. Tak ayal, besarnya jumlah penduduk ini menjadikan Medan sebagai kota dengan perputaran ekonomi terbesar di luar Jawa. Menurut data BPS (2013) masyarakat Kota Medan terdiri dari beragam latar belakang etnis dengan 4 etnis besar yaitu Batak (5.785.719 jiwa), Jawa (4.319.719 jiwa), Melayu (777.1668 jiwa) dan Tionghoa (340.320 jiwa).

Tabel 2

Presentase Persebaran Etnis di Kota Medan Tahun 2004

No	Suku	Persen(%)	Basis Kecamatan
1	Jawa	12,85-59,42	Medan Deli, Medan Marelan dan Medan Polonia
2	Melayu	2,22-23,65	Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Belawan
3	Tapanuli/Toba	5,31-26,78	Medan Kota, Medan Denai dan Medan Helvetia
4	Tionghoa	0,2-29,94	Medan Area, Medan Kota, medan Maimun, Medan Petisah dan Medan Barat
5	Tapanuli Selatan/Madina	4,48-24,36	Medan Tembung, Medan Barat, Medan Timur dan Medan Amplas
6	Karo	0,64-32,5	Medan Baru, Medan Selayang dan Medan Tuntungan
7	Simalungun	0,63-3,28	Medan Selayang dan Medan Tuntungan
8	Pakpak/Dairi	0,2-2,48	Medan Johor dan Medan Tuntungan

9	Nias	0,18-1,82	Medan Tuntungan, Medan Johor dan Medan Amplas
10	Pesisir/Tapanuli Tengah	0,09-0,61	Medan Barat, Medan Belawan dan Medan Johor
11	Minangkabau	2,77-30,93	Medan Area, Medan Denai, Medan Maimun dan Medan Kota
12	Tamil/India	0,09-6,27	Medan Polonia, Medan Petisah dan Medan Baru
13	Arab	0,20-0,35	Medan Area, Medan Timur dan Medan Perjuangan
Jumlah		100,00%	

Jumlah penduduk yang besar tersebut berbanding lurus dengan jumlah pemilih tetap di Kota Medan. Pemilih yang dalam konteks ini adalah mereka yang penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau sudah/pernah kawin (PKPU 8 tahun 2018). Pada gelaran pemilu Gubernur 2018 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada 27 Juni 2018 yang lalu, setidaknya 1.520.301 orang atau setara dengan 67% penduduk Kota Medan terdaftar sebagai pemilih tetap yang tersebar di 3024 TPS. Angka ini menjadi yang terbesar dibanding dengan 32 kota/kabupaten lain di Sumatera Utara. Angka ini didapat melalui proses yang tidak sebentar. Beberapa tahapan yang harus ditempuh guna mendapat angka DPT tersebut, pertama, seluruh penduduk potensial(memenuhi kriteria sebagai pemilih) akan didata terlebih dahulu dan dimasukkan dalam daftar pemilih sementara (DPS). Lalu DPS akan dimutakhirkan datanya melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh tim panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) sehingga DPS dapat dijaga kevalidannya. Selanjutnya, penentuan DPT berdasarkan PKPU 8 2018 pasa 1 ayat 25 adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS<sup>5</sup> dan ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota. Guna memudahkan kerja PPS, maka dibentuklah KPPS yang bertugas menyelenggarakan pemungutan suara di TPS. Proses panjang ini bertujuan untuk memperoleh data pemilih yang valid sehingga diharapkan tidak lagi ada warga yang kehilangan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT.

---

<sup>5</sup> PPS sendiri adalah panitia pemungutan suara yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat desa/kelurahan.

Tabel 3

Daftar TPS dan DPT Kota Medan.

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah DPT
1	Medan Amplas	174	7565
2	Medan Area	156	75,775
3	Medan Barat	100	63,653
4	Medan Baru	60	30,087
5	Medan Belawan	133	60,921
6	Medan Deli	186	108,605
7	Medan Denai	210	10026
8	Medan Helvetia	211	9115
9	Medan Johor	174	104,108
10	Medan Kota	122	68,749
11	Medan Labuhan	164	74,988
12	Medan Maimun	67	42,318
13	Medan Marelan	166	80,628
14	Medan Perjuangan	146	68,219
15	Medan Petisah	110	49,868
16	Medan Polonia	74	35,988
17	Medan Selayang	153	6709
18	Medan Sunggal	167	85,175
19	Medan Tembung	182	91,691
20	Medan Timur	160	80,666
21	Medan Tuntungan	109	64,712
	Total	3,024	1.520.301

Sumber : KPU Medan

## 2. Riwayat Pemilihan Kota Medan

Pasca reformasi 1998, Indonesia setidaknya telah menyelenggarakan lebih dari 10 kali pemilihan umum (pemilu) baik ditingkat nasional maupun daerah. Hal ini tidak terlepas dari

kebijakan pemerintah melalui UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang kemudian diikuti UU No 12 tahun 2008 tentang pemilihan kepala daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD melainkan langsung dipilih langsung oleh rakyatnya melalui mekanisme pemilu. Di Kota Medan sendiri telah terselenggara 3 kali pemilu eksekutif dan legislatif di tahun 2004, 2009 dan 2014 serta 6 kali pemilu kepala daerah (pilkada) pada tahun 2005, 2008, 2010, 2013, 2015 dan 2018. Dalam prosesnya perlu disadari bahwa tidak selamanya pemilu dapat berjalan mulus. Berbagai dinamika turut mewarnai penyelenggaraannya mulai dari tingkat partisipasi pemilih, verifikasi data hingga sengketa hasil pemilu.

Penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) di Kota Medan baik tahun 2004, 2009 hingga 2014 menunjukkan fenomena yang berbeda-beda mengingat konteks sosial politik di Indonesia yang cukup dinamis. Pada Pilpres pertama di tahun 2004 euphoria masyarakat Kota Medan dapat dikatakan cukup rendah. Kampanye para calon yang umumnya meriah justru terasa sepi dan tak semarak, hanya spanduk Megawati-Hasyim Muzadi yang terlihat mencolok di beberapa sudut kota, sisanya, tidak banyak baliho, poster, dan selebaran yang ditemukan di jalanan. Suasana yang sama juga terlihat di beberapa pos koordinasi tim sukses calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Atmosphere berbeda justru di tunjukan pada penyelenggaraan Pilpres tahun-tahun berikutnya. Belajar dari pengalaman periode sebelumnya, para calon-tim suksesnya berusaha mendongkrak antusiasme warga Kota Medan dengan mendatangkan tokoh-tokoh nasional hingga artis Ibu Kota. Meski tidak menjadi faktor tunggal, setidaknya cara-cara tersebut berhasil menarik perhatian masyarakat--pemilih. Meski antusiasme warga terus meningkat di tiap gelaran Pilpres, namun hal tersebut tidak menjanjikan tingkat partisipasi pemilih di Kota Medan tinggi.

Tak hanya perkara antusiasme pemilih, salah satu sorotan dalam penyelenggaraan pilpres di Kota Medan adalah validitas data pemilih. Sebagai contoh pada Pilpres 2004 dilaporkan bawah di TPS Kecamatan Medan Denai (di Pesantren Al-Kautsar) setidaknya 25 pemilih berusia di bawah 17 tahun datang ke TPS untuk mencoblos. Di TPS XXX, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, 15 mahasiswa menggunakan surat panggilan (C6) untuk mencoblos atas nama orang lain dengan alasan nama-nama yang tercantum dalam surat undangan tersebut tidak berada di tempat. sementara itu di Pilpres 2014 panitia pengawas kota Medan setidaknya menemukan 5 pelanggaran masif seperti kotak suara yang dibuka tanpa dihadiri panitia pengawas dan saksi, penggunaan formulir C6 milik orang lain, warga dari Kabupaten lain yang terdaftar di DPT Medan dan tidak memiliki formulir perpindahan pemilih namun diberi kesempatan mencoblos oleh KPPS.

Nyatanya permasalahan disekitar penyelenggaraan Pilpres juga dirasakan dalam pada pemilu tingkat daerah seperti pemilihan gubernur dan walikota di kota Medan. Setidaknya dari 6 kali pelaksanaannya ditahun 2005, 2008, 2010, 2013 2015 dan 2018, permasalahan yang kerap muncul adalah penolakan warga terhadap calon, administrasi dan netralitas. Pemilu Walikota (Pilwalkot) 2005 misalnya, salah satu calon yang sedang berlaga saat itu yang juga Walikota incumbent, Abdillah, mendapat penolakan dari elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aksi

*Bersama Mahasiswa Medan.* Mahasiswa menuntut pengusutan kasus politik uang yang diduga dilakukan oleh Abdillah bersama beberapa anggota Dewan dalam Pilwalkot Medan sebelumnya di tahun 2000.

Permasalahan administrasi yang lagi-lagi hadir pada penyelenggaraan Pilkada (Gubernur/Walikota) di Medan adalah verifikasi DPT. DPT yang ditetapkan KPU Daerah dianggap tidak *clear sehingga* mendorong ratusan massa gabungan dari beberapa kecamatan di Kota Medan melakukan aksi untuk menuntut pilkada Sumatera Utara 2008 diulang karena banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPT. Aksi ini mengatakan tidak berpihak pada salah satu calon dan murni kesadaran masyarakat, namun beberapa peserta aksi justru menyatakan bahwa mereka tidak tahu kalau undangan pengajian gabungan kelompok pengajian seluruh Medan yang mereka didapat justru berujung aksi unjuk rasa ke kantor KPU Sumut. Aksi ini kemudian ditanggapi secara terbuka oleh KPU Daerah meski tuntutan untuk pemilihan ulang tidak dapat dipenuhi karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak relevan jika pemilu harus diulang dengan alasan banyaknya pemilih yang tidak terdaftar. Seharusnya pemilih juga berperan aktif memastikan dirinya sendiri terdaftar dalam DPT dengan melakukan pengecekan.

Netralitas berbagai elemen masyarakat seperti media dan pejabat publik turut menambah dinamika penyelenggaraan Pilkada di Kota Medan. Pada Pilwalkot 2005 misalnya, media lokal ditengarai berpihak pada salah satu calon dengan secara terang-terangan memasang headline pemberitaan yang menggiring opini publik untuk mendukung calon tersebut. Kabar keberpihakan tersebut memang tidak disangkal pihak media itu sendiri. Sementara itu pejabat publik yang terbukti memihak adalah Camat Medan Labuhan, Syaiful Bahri yang memobilisasi warga untuk memilih Abdillah. Hal itu terungkap dalam bukti rekaman yang ditunjukkan pasangan calon walikota lainnya, Maulana Pohan dan Sigit Pramono Asri, kepada wartawan.

Keberagaman latar belakang suku penduduk Kota Medan juga menjadi perhatian para politisi. Representasi kelompok-kelompok masyarakat menjadi penting untuk meraih suara, seperti yang terjadi pada Pilwakot 2010. Kehadiran Sofyan Tan sebagai representasi warga keturunan Tionghoa memberi dampak positif. Beberapa warga keturunan Tionghoa dikawasan Mega Mas Kota Medan saat itu mengaku lebih antusias pada gelaran pilkada dan menaruh harapan lebih pada Sofyan. Namun, meski mampu menarik simpatik warga keturunan, kehadiran Sofyan Tan tidak mampu mendongkrak tingkat partisipasi pemilih secara signifikan.

Berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Medan secara tidak langsung berimplikasi pada tingkat partisipasi pemilih. Dari 6 kali gelaran pilkada (2005-2015) tingkat partisipasi pemilih selalu di bawah target.

Tabel 5

## Presentase Partisipasi Pemilih Kota Medan dalam Pilkada

No	Tahun	Presentase
1	Pilwakot 2005	54,7%
2	Pilgub 2008	47,1%
3	Pilwakot 2010	38,3%
4	Pilgub 2013	36,58%
5	Pilwakot 2015	25,38%
6	Pilgub 2018	58,38%

Sumber :Tabel diolah dari berbagai sumber

Dari tabel di atas titik krisis partisipasi pemilih kota Medan dialami saat Pilwakot 2015 dengan persentase 25,38%. Sebagai pilkada serentak pertama pasca disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pilwalkot Medan 2015 hasil tersebut tentu mengejutkan seluruh pihak karena angka tersebut menempatkan Kota Medan di posisi 264 dari 264 daerah di Indonesia yang mengadakan pilkada.

Berkaca dari kejadian di pilkada sebelumnya, KPU Kota Medan pada Pilgub Sumatera Utara 2018 melakukan verifikasi yang cukup serius. Hal ini terlihat dari drastisnya perubahan DPT Kota Medan pada Pilgub Sumut 2018 yang berjumlah 1.513.835 pemilih. Angka ini jauh menurun bila dibandingkan dengan data DPT Pilwalkot Medan 2015 sebelumnya yang berjumlah 1.985.096 pemilih. Selisih penurunan jumlah pemilih ini mencapai 471.261 jiwa. Selain verifikasi data yang dilakukan KPU Kota Medan, kedua calon yang “berlaga” pada pilkada kali ini yaitu Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Edy-ljeck) yang diusung partai Gerindra, PKS, PAN, Golkar, Nasdem, Hanura serta Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djarot-Sihar) yang diusung PDIP-PPP dirasa cukup menarik perhatian masyarakat.

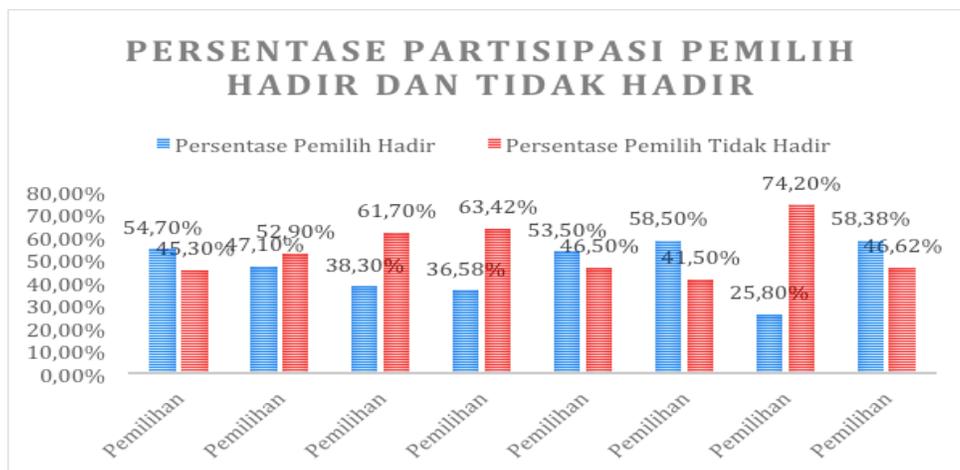
Edy Rahmayadi memiliki latar belakang sebagai perwira militer yang pernah bermarkas di Namu Sira-sira, langkat, Sumatera Utara dan wakilnya, Musa Rajekshah, merupakan pengusaha asli Kota Medan. Berbeda dengan Edy Rahmayadi yang sudah dikenal, Djarot Syaiful Hidayat tergolong orang baru di Sumut. Meski orang mengenal Djarot dengan *track recordnya* sebagai birokrat yang berhasil, namun semua itu ia dapat di Jawa. Sementara itu, wakilnya

merupakan pengusaha asli Sumut dan politisi. Meski tidak menjadi faktor tunggal, baik verifikasi serius yang dilakukan KPU Kota Medan dan citra yang dibentuk calon nyatanya mampu mendongkrak partisipasi pemilih dari yang sebelumnya 25,38% menjadi 5,38%.

Berangkat dari pemaparan diatas, salah satu masalah serius yang menjadi sorotan dari penyelenggaraan pemilu baik ditingkat nasional maupun daerah di Kota Medan adalah tingkat partisipasi pemilih. Tak dapat dipungkiri bahwa riwayat partisipasi pemilih di kota Medan tidak menunjukkan trend yang memuaskan atau paling tidak stabil (fluktuatif) dari tahun ke tahun. Dalam 20 tahun terakhir penyelenggaraan pemilu di Kota Medan, partisipasi pemilih tidak pernah mencapai angka 70%.

Grafik 1

Presentase Partisipasi Pemilih Hadir dan Tidak Hadir



Grafik diatas setidaknya menunjukkan bahwa partisipasi pemilih di kota Medan memiliki 2 karakteristik, pertama bahwa partisipasi pemilih kota Medan bersifat fluktuatif. Artinya, trend pemilih Medan tidak dapat dikatakan terus menurun setiap penyelenggaraan pemilu. Karakteristik kedua bahwa partisipasi pemilih kota Medan untuk pemilu nasional – pileg 2014 dan pilpres 2014 – menunjukkan persentase yang lebih tinggi dibanding pemilu di tingkat daerah. Argumen ini memunculkan asumsi bahwa pemilih di Kota Medan cenderung lebih antusias terhadap pemilu berskala nasional dibandingkan dengan pemilu skala lokal(daerah). Pemilu tingkat daerah seperti Gubernur atau Walikota menjadi tidak menarik bagi pemilih Medan, terlihat dari dua pemilu sebelumnya yaitu pilwakot 2010 dan 2013 yang berkisar angka 35% keatas serta pilwakot 2015 yang menduduki angka hanya 25%. Tingkatan persentase terendah terjadi pada pilwakot 2015 sedangkan untuk tingkat partisipasi tertinggi terjadi pada

gelaran pilpres 2014. Berbagai faktor dapat melatar belakangi dan mempengaruhi tingkat kehadiran pemilih dalam pemilu. Oleh karenanya pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai dimensi-dimensi atau faktor yang melatar belakangi perilaku pemilih tersebut.

# Bab 3. Dimensi Behavioral sebagai Argumen Perilaku Pemilih

Bab ini fokus untuk menjelaskan ketidakhadiran pemilih dengan pendekatan perilaku memilih atau voting behaviour. Ada cukup banyak behaviorist yang menjelaskan alasan seseorang untuk memutuskan tidak datang ke tempat pemungutan suara. Dalam kaitannya untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang disusun berdasarkan perspektif perilaku pemilih, identifikasi untuk mencari tentang siapakah 'individu' atau 'kelompok' yang memberikan efek terhadap tingginya persentase Pemilih Tidak Datang (PTD) dilakukan. Hal ini menjadi penting untuk dielaborasi jika melihat terhadap konteks di kota Medan yang beragam. *Pertama*, penduduk kota Medan ialah penduduk yang heterogen. Kota Medan didominasi oleh pendatang yang berasal dari Jawa, Minangkabau, Melayu, Aceh dan daerah lainnya. Selain itu, terdapat pula masyarakat keturunan Tionghoa, komunitas keturunan India, dan etnis Batak di kota Medan.

*Kedua*, kota Medan merupakan kawasan urban dan perdagangan. Letak kota Medan menjadikan kota Medan sebagai perputaran ekonomi tertinggi di luar pulau Jawa (BPS, 2017). Pendalaman data yang dilakukan oleh BPS mengisyaratkan bahwa bisnis/perdagangan merupakan sektor utama disertai jasa dan manufaktur sebagai lapangan kerja terpopuler. *Ketiga*, tingkat mayoritas penduduk kota Medan yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebesar 70,6% penduduk berusia 15 tahun keatas adalah tamat sekolah menengah atau yang lebih tinggi (BPS, 2017). *Keempat*, kawasan rawan korupsi. Integritas pejabat publik di kota Medan cukup buruk dengan beberapa politisi dan pejabat publik yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Predikat sebagai kota korup di Indonesia pun diperoleh oleh kota Medan.

Atas dasar basis data diatas, perihal mendasar untuk mengidentifikasi tentang demografi penduduk (suku, umur, tingkat pendidikan, pendapatan, tingkat kepercayaan terhadap institusi atau pejabat publik) dalam menelisik tentang persentase terbesar dari masing-masing variabel demografi penduduk. Perihal ini menjadi penting bagi kajian ini karena nantinya dapat ditarik premis besar atau data mendasar terkait variabel yang paling berpengaruh terhadap *voters abstention*. Apakah PTD yang mewarnai gelaran Pemilihan Gubernur (pilgub) tahun 2018 di kota Medan mayoritas adalah penduduk usia produktif atau tidak produktif? Bagaimana dengan tingkatan pendapatan? Apakah penduduk yang berasal dari kalangan kelas menengah atas atau kelas menengah kebawah yang mewarnai PTD? Beberapa pertanyaan tersebut dielaborasi dengan metode kuantitatif karena penggunaan metode kuantitatif mampu menunjukkan frekuensi terbesar hingga terkecil demografi penduduk yang tidak datang ke TPS.

## 1. PTD: Demografi Penduduk Kota Medan

Hasil survei tentang profil demografi PTD (usia) menemukan bahwa persentase terbesar diemban oleh usia produktif (26 - 35 tahun) dengan total peresentase sebesar 27,55% disusul dengan kelompok usia 36-45 tahun sebesar 20,41% dan kelompok usia 21-25 tahun sebesar 15,82%. Disisi lain, usia non-produktif (diatas 65 tahun) justru menunjukkan angka persentase terkecil sebesar 2.81% disusul dengan kelompok usia 56-65 tahun sebesar 9,69% dan kelompok usia 46-55 tahun sebesar 11,23%. Dari hasil elaborasi ini dapat terlihat bahwa PTD didominasi oleh usia produktif (kurang dari 55 tahun). Dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas PTD menyelesaikan tingkat pendidikah hingga SMA sebesar 58,42% disusul kelompok tingkat pendidikan SMP dengan selisih lumayan jauh yaitu sebesar 13,78% dan kelompok tingkat pendidikan S-1/lebih tinggi sebesar 8.93%. Sedangkan untuk persentase bagi kelompok tingkat pendidikan lainnya (tidak tamat SD, Tamat SD, Tamat Diploma) sangat kecil yaitu sebesar kurang dari 6%.

Table 1

Tabulasi Data Usia & Pendidikan Responden

Usia	Persen (%)	Pendidikan	Persen (%)
17 – 20 tahun	10,46%	Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD	2.81%
21 – 25 tahun	15,82%	Tamat SD	5.87 %
26 – 35 tahun	27,55%	Tamat SMP	13.78 %
36 – 45 tahun	20,41%	Tamat SMA	58.42 %
46 – 55 tahun	11,23%	Tamat Diploma	4.59 %
56 – 65 tahun	9,69%	Tamat S-1/lebih tinggi	8.93 %
Lebih dari 65 tahun	2,81%	TT/TJ	5.61 %
TT/TJ	2,04%		

Temuan elaborasi data kuantitatif lainnya dengan ukuran kepercayaan/agama menunjukkan bahwa dominasi PTD mengemban kepercayaan/agama Islam dengan total persentase sebesar 64,03% disusul dengan protestan sebesar 15,82%. Persentase terkecil adalah agama Hindu sebesar 0,77% dan Kong Hu Cu sebesar 1,02%. Disisi lain, penelusuran data dengan berbasiskan ekonomi menunjukkan bahwa PTD didominasi oleh kelompok menengah ke atas dengan pendapatan diatas 1 juta rupiah. Eksplorasi data menghasilkan bahwa sebesar 28,57% PTD dengan pendapatan sebesar 1 juta hingga 2 juta rupiah. Disusul oleh kelompok penduduk dengan penghasilan sebesar 2 juta hingga 5 juta rupiah sebesar 17,35%. Disisi lain, persentase terkecil dari PTD jika dilihat dari pendapatan adalah kelompok dengan pendapatan lebih dari 10 juta dengan total 0,26% diikuti oleh titik ekstrim lainnya yaitu kelompok dengan pendapatan 250 ribu rupiah sebesar 2,30%.

Table 2

Tabulasi Data Demografi (Agama/Kepercayaan &amp; Pendapatan)

Agama	Persen (%)	Pendapatan	Persen (%)
Islam	64.03 %	Sampai dengan Rp 250.000	2.30 %
Protestan	15.82 %	Rp 250.001 - Rp 500.000	3.83 %
Katolik	5.36 %	Rp 500.001 - Rp 1.000.000	7.65 %
Hindu	0.77 %	Rp 1.000.001- Rp 2.000.000	28.57 %
Budha	7.65 %	Rp 2.000.001 – Rp 5.000.000	17.35 %
Kong Hu Cu	1.02 %	Rp 5.000.001 - Rp 10.000.000	2.55 %
TT/TJ	5.36 %	Lebih dari Rp 10.000.000	0.26 %
		TT/TJ	37.50 %

Dengan demikian, hasil tabulasi data tentang demografi yang meliputi keempat variabel ini yang memberikan gambaran tentang karakteristik PTD kota Medan. Diantaranya adalah: 1) Penduduk kota Medan berusia produktif 26-35 tahun; 2) Mayoritas PTD berpendidikan SMA; 3) PTD beraliran kepercayaan/agama Islam; 4) PTD adalah penduduk kota Medan yang berasal dari kelas menengah atas.

## 2. PTD: Rasional, Partisipasi & Tingkat Kepercayaan

Identifikasi lebih lanjut terkait dengan perilaku untuk tidak memilih dari penduduk kota Medan. Setidaknya terdapat 5 turunan pertanyaan dalam kuesioner untuk menelisik tentang alasan individu untuk tidak memilih dalam Pilgub 2018. Hasil survei menunjukkan bahwa perilaku tidak memilih oleh penduduk Medan diakibatkan oleh *cost of voting* (waktu) dan apatisisme. Mayoritas penduduk kota Medan lebih mengutamakan untuk bekerja dibandingkan untuk memilih dengan persentase sebesar 34,18% disusul dengan alasan lainnya (22,19%) dan anggapan bahwa pemilu tidak akan mengubah apapun terhadap kehidupan mereka.

Matsusaka (1995) menyebutnya kategori pemilih rasional yang demikian sebagai *traditional rational voter* karena rasionalitas dalam memilih atas dasar alasan cukup sederhana seperti kesibukan pekerjaan. Rasionalisasi tentang teknis seperti tidak terdaftar di TPS, pengaruh lingkungan atau keluarga dan keyakinan agama justru tidak terlalu berpengaruh terhadap perilaku tidak memilih. Tiga kategorisasi tersebut jika dibaca dengan hasil survei hanya berkisar tidak lebih dari 10 persen.

Table 3

## Alasan Perilaku Tidak Memilih

Faktor/Alasan Tidak Datang	Persen (%)
Keluarga/kerabat dekat	3.57 %
Lingkungan tempat tinggal/tetangga	2.30 %
Tidak akan mengubah/memberikan dampak apapun terhadap kehidupan	13.01 %
Tidak kenal dengan kandidat	5.36 %
Kesibukan pekerjaan	34.18 %
Tidak Terdaftar di TPS atau hambatan administrasi lain	7.91 %
Kepercayaan dan keyakinan agama	0.26 %
Lainnya	22.19 %
TT/TJ	11.22 %

Dilihat dari tingkat kepercayaan/kepuasan terhadap institusi pemerintahan di tiga level (Pemerintahan Kota Medan, Pemerintahan Sumatera Utara dan Nasional), hasil survei menyebutkan bahwa penduduk kota Medan merasakan ketidakpuasan terhadap kinerja yang telah dilakukan walaupun hasil survei menunjukkan angka yang tipis dengan rasa kepuasan terhadap kinerja tiga level pemerintahan yang bekerja. Delwit (2013) menyebut ketidakpercayaan terhadap lembaga resmi negara sebagai *institutional constraint* Kajian hasil yang dilakukan menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap lembaga negara menimbulkan adanya *voters abstention*.

Hasil rincian survei menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan kota Medan sebesar 48,21%, pemerintahan Sumatera Utara sebesar 47,70% dan nasional sebesar 43,11%. Persentase ini hampir berimbang dengan rasa kepuasan terhadap kinerja terhadap pemerintah di tiga level. Sebesar 33,42% penduduk kota Medan merasakan kepuasan terhadap kinerja pemerintah kota Medan; sebesar 36,22% merasakan kepuasan terhadap kinerja pemerintah Sumut; dan sebesar 40,82% merasakan kepuasan terhadap kinerja pemerintah pusat. Perbedaan persentase terhadap tingkat kepuasan yang sedikit dapat menarik hipotesis bahwa dimensi tingkat kepercayaan/kepuasan terhadap pemerintah tidak terlalu mempengaruhi secara signifikan terhadap perilaku untuk tidak memilih (lebih lanjut lihat tabel 4).

Table 4

## Tingkat Kepuasan terhadap Pemerintah di Tiga Level

Jawaban	Persen (%)		
	Medan	Sumatera Utara	Nasional
Sangat Tidak Puas	6.63 %	4.59 %	3.06 %
Tidak Puas	48.21 %	47.70 %	43.11 %
Puas	33.42 %	36.22 %	40.82 %
Sangat Puas	1.28 %	0.51 %	2.30 %
TT/TJ	10.46 %	10.97 %	10.71 %
Kong Hu Cu	6.63 %	4.59 %	3.06 %
TT/TJ	48.21 %	47.70 %	43.11 %

Eksplorasi data lainnya dilihat dari dimensi partisipasi. Berpedoman terhadap tiga pertanyaan seperti: Jika Pemilihan Walikota Medan [Gubernur Sumatera Utara, Pemilu Presiden] dilaksanakan hari ini, apakah Bapak/Ibu/Saudara akan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)? dengan cakupan pemilihan dari tataran kota hingga nasional menyebutkan bahwa pemilih akan memilih untuk berpartisipasi. Hasil pengambilan data menyebutkan bahwa pemilih cenderung akan berpartisipasi pada pemilu dengan skala nasional (75%) dibandingkan pada tataran lokal (pilwakot 56,69 % dan pilgub 57,50%). Lebih lanjut, penduduk kota Medan akan cenderung untuk tidak berpartisipasi pada pilgub sumut (15,56%) dibandingkan dengan pilwakot (14,54%) dan pemilu nasional (7,40%). Secara lebih ringkas, hasil penelusuran data ini memberikan kejelasan.

Table 5

## Potensi Partisipasi di Pemilu Tiga Level

Jawaban	Persen (%)		
	Medan	Sumatera Utara	Nasional
Ya	59.69 %	57.50%	75.00 %
Tidak	14.54 %	15.56	7.40 %
TT/TJ	25.77 %	27.05 %	17.60 %

Perbandingan kedua tabulasi diatas memunculkan argumentasi bahwa tingkatan kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah berkorelasi secara signifikan dengan potensi partisipasi penduduk

kota Medan. Argumentasi ini ditarik dengan beberapa bukti hasil cross-tab dari kedua kategorisasi hasil survei. Bukti atas argumentasi diatas secara lebih rinci terlihat dari tingkat ketidakpuasan terhadap pemerintah dari tiga level dimulai dengan persentase terbesar hingga terkecil yang dipegang oleh pemkot Medan (48,21%), pemprov Sumut (47,70%) dan Pusat (43,11%). Sedangkan dari potensi partisipasi dalam pemilu dengan persentase terbesar yang dimulai oleh pemilu nasional (75%), Pilgub (57,50%) dan Pilwakot (59,69).

Table 6  
Korelasi Tingkat Kepuasan dengan Potensi Partisipasi

Cakupan/Scope	Tingkat Kepuasan terhadap Pemerintah	Potensi Partisipasi dalam Pemilu
Medan	48,21%	75%
Sumatera Utara	47,70%	57,50%
Nasional	43,11%	59,69%

### 3. Menguji Perilaku Tidak Memilih (Abstention Voting)

Pembahasan mengenai *voters abstention* dapat dilihat dengan beragam variabel yang menjelaskan lahirnya *voters abstention*. Dari hasil literature yang terhimpun, perkembangan studi tentang *voters abstention* mayoritas memberikan penekanan menggunakan kacamata behavioral (perilaku memilih). Akan tetapi, bacaan tentang lahirnya *voters abstention* dapat dilihat juga secara institusional dimana perihal seperti keterbatasan informasi yang diberikan oleh insitusi penyelenggara maupun persoalan lainnya mempengaruhi lahirnya *abstain voters*. Dalam kaitannya untuk menelisik hal tersebut, tulisan ini akan mengidentifikasi variabel-variabel pendorong *voters abstention*.

Pada penekanan variabel apakah studi klasik hingga saat ini tentang voters abtention? Berangkat dari studi klasik dari Downs, A (1957) yang menekankan persoalan ekonomi, mengistilahkan bahwa keberadaan *voters abstention* dipengaruhi oleh *cost of voting*. Apabila tidak ada dampak *cost of voting* dalam memilih maka pemilih akan datang dan memilih. Namun, penalaran di atas tidak berlaku saat *voting cost* mahal. *Cost of voting* yang mahal tidak hanya soal besaran jumlah uang yang dikeluarkan namun juga waktu yang dihabiskan. Downs, A (1957) menjelaskan bahwa waktu adalah biaya utama dalam proses pemungutan suara atau sumber daya yang langka. Pemilih akan cenderung enggan untuk mengobarkan seperti waktu untuk mendaftar, waktu untuk menemukan informasi tentang partai, waktu pada hari pemilihan dengan pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan waktu untuk menandai surat suara. Perihal ini yang menjadi tindakan rasional bagi pemilih untuk abstain.

Penerjemahan lebih lanjut mengarah kepada dua rasionalitas (Downs, A, 1957). Pertama, pemilih beranggapan bahwa akan banyak orang lain yang akan memilih, sehingga dirinya tidak perlu memilih. Anggapan lain adalah karena para calon yang ada tidak sesuai dengannya maka dia harus memilih yang

paling mendekati. Jika semua orang sampai pada argumen pertama maka tidak ada orang yang akan memilih; sedangkan jika semua orang sampai pada argumen kedua, setiap warga negara akan memilih kecuali dia netral. Hal senada diutarakan oleh Muxel (dalam Delwit, 2013) yang mengungkapkan bahwa kondisi sosial-ekonomi seperti tingginya tingkat pengangguran, ketidaksetaraan sosial jmemengaruhi kemunculan abstainers.

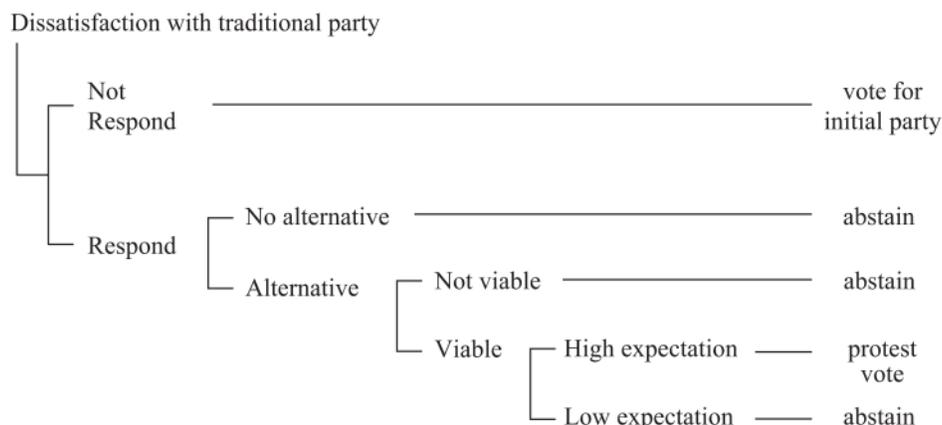
Penekanan dimensi berbeda dimana persoalan teknis (Freixas, J., & Zwicker, W. S., 2003) serta keterbatasan informasi (Ghirardato, P., & Katz, J. N., 2000) turut mewarnai kelahiran *abstain voters*. Hasil kajian yang dilakukan oleh Freixas, J., & Zwicker, W. S., (2003) mengklarifikasi bahwa tindakan absen pada pemilu terkait sejumlah teknis berupa aksesibilitas seperti tidak adanya TPS di rumah sakit. Sedangkan studi yang dilakukan oleh Ghirardato, P., & Katz, J. N., (2000) mengungkapkan bahwa semakin sedikit informasi yang didapat pemilih, semakin besar kemungkinan untuk melakukan kesalahan dalam memilih. Oleh karenanya, pemilih cenderung untuk abstain daripada harus menanggung beban psikologis karena telah memilih pemimpin yang salah.

Di sisi lain, pemilih yang mendapat informasi lebih banyak cenderung akan berpartisipasi untuk memilih kandidat yang benar. Identifikasi serupa tentang psikologis diungkapkan oleh Matsusaka (1995); Hanna, N (2009); dan Brennan (dalam Hanna, N, 2009) yang mengungkapkan kepada dimensi psikologis dengan penekanan yang berbeda, seperti: 1) Membuat keputusan yang bijaksana dalam bilik suara; 2) Keadaan buruk/tekanan; 3) Ketidakmampuan untuk memilih.

Perkembangan kajian *voters abstention* mulai merujuk kepada dimensi ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu, partai politik dan terbatasnya pilihan. Penekanan studi yang dilakukan oleh Kang, W.T (2004) menyebutkan bahwa rasa ketidakpuasan terhadap sistem pemilu dan terbatasnya pilihan adalah faktor yang sangat mempengaruhi terhadap abstention voters. Sebagai konsekuensi, pemilih terkadang memilih partai bukan karena kesetiiaannya atau dari kata hatinya tapi lebih karena tidak ada alternatif pilihan lain. Pemilih dihadapkan kepada pilihan untuk abstain atau memilih namun tidak puas dengan sistem pemilihan plurality. Didasarkan dari hasil kajian klasik yang dilakukan oleh Hirschman dan Barry (dalam Kang, W.T, 2004), pembilahan tentang *protest voters* dan *voters abstention*. Bagan di bawah ini terlihat bahwa untuk sampai keputusan pemilih dinyatakan abstain atau tindakan protes terdapat beberapa alasan:

Figure 1

Klasifikasi Protest Voting dan Voters abstention



Penekanan serupa dilakukan oleh Delwit (2013) dimana *abstain voters* lahir akibat dari konsekuensi melemahnya tingkat kepercayaan terhadap partai politik sebagai lembaga representasi. Berkembangnya abstain membenarkan penjelasan lain untuk kemerosotan jumlah pemilih dimana warga mulai menarik diri kehidupan-kehidupan politik dan menjadi tanda ketidakpedulian serta ketidakpercayaan warga terhadap hal-hal yang identik dengan politik maupun para aktor-aktornya (seperti pada partai politik).

Partai politik menjadi institusi yang paling tidak disukai di antara organisasi dan institusi sosial-politik lainnya. Kegagalan partai politik bertindak untuk menjadi representasi kepentingan rakyat menyebabkan kekecewaan dan menghadirkan *abstain voters*. Logika dasarnya, individu akan memilih untuk bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Oleh karenanya, jumlah pemilih yang rendah mencerminkan tidak adanya hubungan nyata antara memilih dalam pemilihan dan perubahan kebijakan. Problem selanjutnya bahwa penurunan jumlah pemilih berdampak pada tingkat legitimasi pemungutan suara dan sistem pemilihan serta hasil pemilihan.

Variabel tentang keterasingan (*alienation*) dan ketidakpedulian turut memotivasi meningkatnya abstainers. Secara empiris, kajian yang dilakukan oleh Adams, J., Dow, J., & Merrill, S. (2006) dengan mengambil pemilihan presiden Amerika Serikat 1980–1988 membedakan antara abstain yang diakibatkan oleh *alienation* (keterasingan) dari kandidat, ketidakpedulian antara kandidat, dan beberapa kombinasi dari dua motivasi ini. Abstain yang berbasis keterasingan terjadi ketika partai atau kandidat terlalu jauh dari kandidat. Sementara itu, abstain berbasis ketidakpedulian terjadi ketika partai atau kandidat terlalu memaksakan kehendak. Namun, studi empiris yang relatif lebih sedikit ini berusaha membedakan dua sumber abstain ini.

Abstain karena *alienation* (keterasingan) berarti pemilih terlalu jauh secara ideologis dari kandidat pilihannya, dan abstain karena ketidakpedulian berarti bahwa jarak ideologis antara kandidat tidak cukup untuk membenarkan segala tindakan sang kandidat. Sebagai ilustrasi, abstain berbasis ketidakpedulian pada pemilihan presiden yang menampilkan kandidat yang menarik tidak memotivasi pemilih untuk berpartisipasi. Tapi dengan abstain berbasis alienasi, kandidat yang menarik mampu menarik pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Studi Zipp (1985) dan Plane & Gershtenson (2004) menemukan bahwa *alienation* (keterasingan) serta ketidakpedulian warga berkontribusi pada kemungkinan abstain pada tingkatan level pemilu yang berbeda. Kedua studi menemukannya bahwa ketidakpedulian adalah sumber utama abstain warga dalam pemilihan presiden (Zipp, 1985), sementara *alienation* (keterasingan) merupakan sumber utama abstain dalam pemilihan senator (Plane dan Gershtenson, 2004)

Atas dasar itu, hasil studi ini menemukan bahwa *alienation* dengan abstention menimbulkan efek bagi berjalannya pemilu. *Pertama*, abstain karena keterasingan atau ketidakpedulian menguntungkan kandidat dari salah satu partai politik; *Kedua*, pemilihan presiden yang melibatkan calon yang menarik memotivasi jumlah pemilih yang lebih tinggi, namun keadaan ini hanya berlaku untuk abstainers yang disebabkan oleh keterasingan dan bukan abstain karena ketidakpedulian; *Ketiga*,

kecenderungan tingkat individualis warga negara untuk abstain karena keterasingan sangat dipengaruhi oleh evaluasi kebijakan kandidat, sementara tingkat partisipasi keseluruhan tidak bergantung secara signifikan pada platform kebijakan kandidat.

Dengan berlandaskan dari beragam jenis variabel yang mempengaruhi *voters abstention* diatas, kajian ini akan melihat *voters abstention* dalam konteks Indonesia. Lebih spesifik, dalam pemilihan gubernur (pilgub) Sumatera Utara tahun 2018. Hasil literature review ini membantu terhadap kajian ini akan mengidentifikasi tentang variabel apakah yang paling berpengaruh dalam tingginya *abstain voters* di kota Medan.

Berdasarkan literature review dalam perspektif behaviourists di atas, maka kami melakukan uji statistik korelasi antara beberapa variable yang merepresentasikan *hypothetical arguments* yang telah kami susun. kami menggunakan two-way tabulation untuk menjelaskan distribusi data kategorikal (discrete) antara beberapa variable independen dengan variable terikat. Selanjutnya, kami melakukan uji Parson's Chi-square untuk mengetahui signifikansi hubungan antara dua variable.

Dalam hal ini, potensi memilih yang diformulasikan ke dalam tiga pertanyaan partisipasi pemilu kami gunakan sebagai variable terikat. Adapun fomula pertanyaannya adalah "Jika pemilu [jabatan eksekutif di tiga tingkatan—walikota, gubernur, presiden] dilakukan pada hari ini, apakah Anda akan menggunakan suara Anda dengan datang ke TPS?" Formula pertanyaan ini berlaku untuk tiga pertanyaan potensi partisipasi di level pusat (presiden), provinsi (gubernur), dan kota (walikota). Terkait dengan pertanyaan tersebut, 392 responden menjawab secara berbeda pada tiga level pemilu, terutama antara pemilu kepala daerah dan pemilu praside. Sebagaimana terlihat pada Tabel di atas, potensi Pemilih di Medan akan datang pada pemilu praside jauh lebih besar dibandingkan pemilu presiden.

Berdasarkan uji statistik terhadap lima variable besar yang menjelaskan ketidakhadiran pemilih, maka variable evaluatif (seperti tingkat kepuasan dan kepercayaan terhadap pemerintahan) dan variable rasional seperti 'biaya' partisipasi yang dijelaskan oleh demografi sosial (tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan), menjadi variable yang paling menjelaskan ketidakhadiran pemilih dibandingkan tiga variable lainnya. Sementara itu, tiga variable yang tidak cukup signifikan (probabilitas di bawah 0.05 atau  $P > 0.05$ ) dalam menjelaskan ketidakhadiran pemilih adalah: 1) exposure informasi atas pemilu termasuk kampanye; 2) aspek teknis-administratif penyelenggaraan pemilu terutama pemungutan suara; 3) dan asosiasi social pemilih seperti kekerabatan, agama, dan etnisitas. Elaborasi atas analisis ini kami sampaikan ke dalam beberapa bagian di bawah ini.

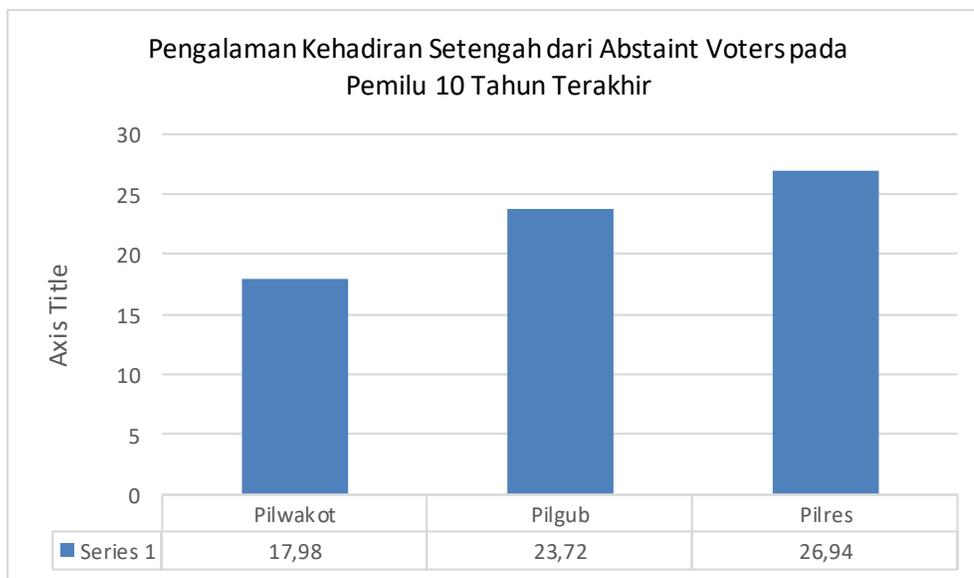
#### **4. Variabel Evaluatif**

Hal paling nampak mempunyai distribusi yang mirip dengan distribusi potensi pemilu adalah pada variable evaluative. Terkait hal ini, jumlah responden yang percaya atau puas dengan pemerintah pusat jauh lebih besar dibandingkan dengan pemerintah daerah. Sebagaimana terlihat pada grafik di bawah. Level pemilu menjelaskan partisipasi pemilih. Dari populasi pemilih yang tidak datang (*abstain voters*), terdapat 59.59% pemilih yang akan datang pada pemilu walikota Meda, 57.40% datang pada pemilu gubernur, dan 75% akan datang pada pemilu presiden. Studi ini juga menunjukkan bahwa separuh (50%) dari total responden yang tidak datang pada pemungutan suara juga mempunyai pengalaman tidak datang pada pemungutan suara pemilu sebelumnya. Artinya, setiap satu dari dua

orang yang tidak datang pada hari pemungutan suara juga tidak datang pada pemilu sebelumnya. Dari separuh responden yang mempunyai 'habit' abstain tersebut, pola ketidakhadiran pada pemilu lokal terutama pada level kota (pemilihan walikota) cenderung lebih besar atau sering dibandingkan pada pemilu nasional (pemilu presiden). Data survey menunjukkan bahwa rerata kehadiran dari 50% abstain voters tersebut pada pemilu 10 tahun terakhir di tiga level pemilu (pilwakot 2015 dan 2010, pilgub 2013 dan 2008, dan pilpres 2014 dan 2009) lebih banyak pada pemilu presiden (26.94%) baru kemudian diikuti pemilu gubernur (23.72%) dan paling rendah pemilu walikota (17.98%).

Grafik 1

Rerata Kehadiran Reponden pada Pilwakot, Pilgub, dan Pilpres 10 Tahun Terakhir



Menguji

## 5. Perilaku Tidak Memilih

Lalu pertanyaannya, apa yang menjelaskan tingkat kehadiran pada pemilu nasional lebih besar dibandingkan pada pemilu lokal? Berdasarkan literature yang telah kami presentasikan di atas, ada beberapa variable yang bisa diuji melalui dengan tingkat potensi partisipasi pemilu, seperti tingkat kepercayaan pemilih terhadap institusi; tingkat kepuasan pemilih terhadap; atau pengetahuan terhadap pemilu itu sendiri. Terkait dengan poin pertama, studi ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan para pemilih yang tidak datang ini pada pemerintah pusat (presiden) lebih tinggi (64.03%) dibandingkan tingkat kepercayaan terhadap kepala daerah (59.18%). Poin kedua pun tidak jauh berbeda dimana hal responden yang tidak datang ke TPS juga lebih tinggi. Hal ini menjadi pintu masuk untuk menguji apakah variable-variabel tersebut bekerja untuk konteks di Indonesia.

Jika kita peras beberapa tesis yang menjelaskan ketidakhadiran pemilih, maka terdapat lima tesis besar yang bisa diuji: 1) evaluasi atas kinerja inkamben atau kita sebut dengan tesis evaluasi; 2) pertimbangan rasional ekonomi atas untung-rugi datang ke TPS atau kita sebut dengan tesis rasional-ekonomi; 3) argument atas asosiasi atau kelompok sosial pemilih yang selanjutnya kita sebut sebagai tesis ikatan sosial; 4) kampanye dan exposure informasi terkait pemilu atau kita sebut dengan tesis kampanye/sosialisasi; 5) dan terakhir adalah terkait dengan teknis dan administrasi penyelenggaraan pemilu atau tesis administrasi-teknis.

Pertama, bagaimana dengan relasi antara variable evaluative dan potensi partisipasi pemilih? Studi ini mengkonfirmasi tesis besar dalam literature bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat kepuasan atau tingkat kepercayaan responden terhadap partisipasi pemilih. Artinya, pemilih yang tidak puas atau tidak percaya terhadap kepala daerah maka berpotensi untuk tidak datang ke tempat pemungutan suara pada hari pemilihan. Begitu sebaliknya. Sebagaimana terlihat pada uji Pearson's Chi-square di bawah. Bahwa korelasi kedua variable adalah signifikan yang ditandai dengan  $P < 0.05$ , baik pada tingkat kepuasan terhadap pemerintah provinsi dengan nilai probabilitas 0.000 maupun juga tingkat kepercayaan ( $P = 0.000$ ). Kedua hasil analisis uji signifikansi variable ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan dan tingkat kepercayaan pemilih terhadap inkamben atau pemerintah berpengaruh terhadap datang-tidaknya pemilih ke TPS, karena  $Pr < 0.05$ .

### Tesis Evaluasi 1

#### Tingkat Kepercayaan terhadap Datang/Tidak Datang dalam Pemilu

Percaya Pemda	Datang PilGub				Total
	Datang	Tdk Datang	invalid	Tdk Tahu/	
Sangat Percaya	4	1	0	0	5
Percaya	150	26	0	51	227
Tidak Percaya	44	19	3	26	92
Sangat Tdk Percaya	2	3	0	1	6
Tidak tahu/jawab	25	12	0	25	62
Total	225	61	3	103	392

Pearson chi2( 12) = 35.2064 Pr = 0.000

## Tesis Evaluasi 1

### Tingkat Kepuasan terhadap Datang/Tidak Datang dalam Pemilu

Puas PemProv	Datang PilGub				Total
	Datang	Tdk Datang	invalid	Tdk Tahu/	
Sangat Tdk Puan	3	10	0	5	18
Tdk Puan	95	27	2	63	187
Puan	110	12	0	20	142
Sangat Puan	1	0	0	1	2
Invalid	1	0	0	1	2
Tdk Tahu/Jawab	15	12	1	13	41
Total	225	61	3	103	392

edua, Pearson chi2( 15) = 64.8135 Pr = 0.000

hal lain yang juga penting adalah *cost of participation* alias biaya yang dikeluarkan oleh pemilih jika suara digunakan atau datang ke TPS. Di dalam sistem pemilu dengan voluntary voting seperti di Indonesia, dimana pemilih tidak diwajibkan untuk menggunakan suaranya (compulsory voting) seperti di Australia dan beberapa negara Skandinavia, isu atas biaya partisipasi menjadi sangat relevan. Terkait dengan hal ini, kami mengambil dua variable yang paling menjelaskan tingkat ekonomi responden, yaitu jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan. Hasilnya, analisis uji signifikansi variable jenis pekerjaan responden terhadap potensi memilih dalam Pilgub mempunyai nilai probabilitas 0.018. Sementara itu, analisis chi-square yang sama pada tingkat pendapatan responden menunjukkan hasil nilai probabilitas adalah 0.000. Dengan  $Pr < 0.05$ , maka jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap potensi partisipasi dalam pemilihan gubernur.

## Tesis 2

### Rasional-Ekonomi: Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Datang PilGub				Total
	Datang	Tdk Datang	invalid	Tdk Tahu/	
Buruh	14	7	0	9	30
Pengajar	1	2	0	3	6
Ibu Rmh Tng	47	4	1	24	76
Pelajar/Mhsw	28	6	0	15	49
Nelayan	4	1	0	1	6
Pedagang Kecil	20	6	0	6	32
PNS	2	0	0	0	2
Karyawan Swst	47	5	1	24	77
Pengusaha	10	5	0	4	19
Pensiun	3	4	1	2	10
Petani	2	2	0	2	6
Profesional	1	0	0	1	2
Menganggur	13	3	0	4	20
Wiraswasta	23	5	0	3	31
Tdk Jawab/Tahu	10	11	0	5	26
<b>Total</b>	<b>225</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>103</b>	<b>392</b>

Pearson chi2( 42) = 63.3933 Pr = 0.018

## Tesis 2

### Rasional-Ekonomi: Pendapatan

Pendapatan	Datang PilGub				Total
	Datang	Tdk Datang	invalid	Tdk Tahu/	
<= 250,000	5	0	0	4	9
250,001-500,000	12	2	0	1	15
500,001-1000,000	21	3	0	6	30
1000,001-2000,000	72	22	1	17	112
2000,001-5000,000	37	11	0	20	68
5000,001-6000,000	6	2	0	2	10
Invalid	0	1	0	0	1
invalid	1	0	1	0	2
Tidak jawab	71	20	1	53	145
<b>Total</b>	<b>225</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>103</b>	<b>392</b>

Pearson chi2( 24) = 94.6198 Pr = 0.000

etiga, terkait dengan asosiasi sosial, kami menguji pertanyaan apakah responden tinggal dengan kelompok sosial terutama etnis yang sama atau cenderung heterogen. Di sisi lain, kami mengambil proxy atas tesis ikatan sosial dengan tingkat sosialisasi responden dengan tetangga atau masyarakat di sekitar

tempat tinggalnya. Hasilnya, variable tempat tinggal dengan kelompok sosial yang sama mempunyai nilai probabilitas 0.010, sementara variable sosialisasi diri dengan masyarakat mempunyai nilai probabilitas 0.023. Artinya, kedua variable tersebut mempunyai nilai signifikansi atas analisis Pearson's Chi-square.

### Tesis 3

#### Ikatan Sosial: Preferensi Domisi Kelompok Etnis

Preferensi Domisili Se-Etnis	Datang PilGub				Total
	Datang	Tdk Datang	invalid	Tdk Tahu/	
Suka Tinggal Se-Etnis	132	20	2	58	212
Tdk Suka Tgl Se-Etnis	45	22	1	17	85
Tidak Jawab/Tahu	48	19	0	28	95
Total	225	61	3	103	392

Pearson chi2( 6) = 16.8277 Pr = 0.010

### Tesis 3

#### Ikatan Sosial: Preferensi Domisi Kelompok Etnis

Frekuensi Sosialisasi	Datang PilGub				Total
	Datang	Tdk Datang	invalid	Tdk Tahu/	
Tiap Tahun	9	7	0	2	18
Tiap Bulan	20	10	0	12	42
Tiap Minggu	57	16	1	15	89
Tiap Hari	104	16	2	61	183
Invalid	1	1	0	0	2
Tdk jawab/Tahun	34	11	0	13	58
Total	225	61	3	103	392

Pearson chi2( 15) = 27.8033 Pr = 0.023

Keempat, kami juga menelusuri exposure responden atas informasi atau kampanye terkait dengan pemilihan gubernur yang beberapa hari sebelumnya berlangsung di Kota Meda. Kami mengambil pertanyaan apakah responden berpartisipasi atau menghadiri sosialisasi pemilu, kampanye kandidat maupun oleh penyelenggara pemilu (KPU), serta apakah responden didatangi atau diajak oleh tim sukses atau simpatisan kandidat untuk datang ke TPS. Dari dua variable tersebut, kami menemukan bahwa keduanya mempunyai nilai probabilitas masing-masing 0.002 untuk variabel partisipasi dalam sosialisasi yang dilakukan penyelenggara atau kandidat dan 0.017 untuk variable mobilisasi atau ajakan datang ke

TPS oleh simpatisan kandidat. Artinya, kedua variable tersebut juga berpengaruh terhadap datang atau tidaknya pemilih ke tempat pemungutan suara.

#### Tesis 4

#### Informasi Pemilu dan Kampanye

Partisipasi Kampanye/Sosia lisasi Pemilu	Datang PilGub				Total
	Datang	Tdk Datan	invalid	Tdk Tahu/	
Hadir	67	15	2	23	107
Tdk Hadir	142	33	1	54	230
Invalid	0	0	0	1	1
Tdk Jawab/Tahu	16	13	0	25	54
Total	225	61	3	103	392

Pearson chi2( 9) = 26.5174 Pr = 0.002

Mobilisasi oleh Kandidat	Datang PilGub				Total
	Datang	Tdk Datan	invalid	Tdk Tahu/	
Ada Mobilisasi	56	24	1	24	105
Tdk ada Mobilisasi	155	26	2	65	248
Invalid	1	0	0	0	1
Tdk Jawab/Tahu	13	11	0	14	38
Total	225	61	3	103	392

Pearson chi2( 9) = 20.2311 Pr = 0.017

Terakhir, kami menguji beberapa aspek teknis dan administrative yang mungkin berpengaruh pada keputusan responden untuk datang atau tidak datang ke bilik suara. Terkait dengan hal ini, kami menanyakan responden mengenai pengetahuan mereka terhadap lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pengetahuan responden atas diri mereka dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hasil analisis uji signifikansi variable TPS dan DPT masing-masing mempunyai nilai probabilitas 0.000 dan 0.024 secara berturut-turut. Artinya, pengetahuan responden atas lokasi TPS dan pengetahuan pemilih atas dirinya di dalam DPT sama-sama berpengaruh terhadap datang/tidaknya pemilih dalam pemilu.

#### Tesis 5

Teknis-

Alasan TPS	Datang PilGub				Total
	Datang	Tdk Datang	invalid	Tdk Tahu/	
Ya Beralasan	24	7	0	7	38
Tidak ber alasan	175	36	3	80	294
Invalid	0	0	0	1	1
Invalid	0	0	0	1	1
Invalid	1	0	0	0	1
Tdk Jawab/Tahu	25	18	0	14	57
Total	225	61	3	103	392

Pearson chi2( 15) = 22.3316 Pr = 0.099

Administrasi

Pengetahuan DPT	Datang PilGub				Total
	Datang	Tdk Datang	invalid	Tdk Tahu/	
Tahu	125	22	1	42	190
Tdk Tahu	81	27	2	45	155
Tdk Jawab/Tahu	19	12	0	16	47
Total	225	61	3	103	392

Pearson chi2( 6) = 14.5308 Pr = 0.024

Berdasarkan elaborasi dari beberapa variable di atas terkait dengan keputusan para abstention voters untuk datang atau tidak datang pada pemilu gubernur Sumatera Selatan jika pilgub dilakukan pada saat survei berlangsung, maka didapatkan kesimpulan bahwa praktis semua variable yang kita uji berdasar tesis-tesis di dalam literature mempunyai korelasi terhadap tingkat partisipasi pemilih. Hal ini terlihat dari perbandingan tabulasi hasil analisis uji Pearson's Chi-square di atas.



Tabel 6

Hasil Analisis Pearson's Chi-square Atas Lima Tesis *Abstention Voting*

Variabel Bebas	Variabel Terikat	Nilai Probabilitas
T. Evaluasi Inkamben	Potensi Partisipasi dalam Pemilihan Gubernur	
Kepercayaan thd Pemda		0.000
Kepuasan thd Pemprov		0.000
T. Rasional		
Pekerjaan		0.018
Pendapatan		0.000
T. Ikatan Sosial		
Tetangga Se-etnis		0.010
Sosialisasi Kemasyarakatan		0.023
T. Kampanye/Sosialisasi		
Partisipasi Kampanye		0.002
Mobilisasi		0.017
T. Teknis/Administrasi		
Pengetahuan TPS		0.000
Pengetahuan DPT		0.024
Signifikan: $P < 0.05$		

## **Bab 4. Dimensi Institusional sebagai Penjelas Keberadaan Voters Abstention**

Kehadiran pemilih abstain pada Pilgub Sumatera Utara 2018 di Medan diwarnai dengan hadirnya sejumlah faktor non-behavioral. Faktor-faktor ini dikategorikan sebagai faktor institusional mengingat sifatnya yang melibatkan aspek pelebagaan yang mempengaruhi tindakan pemilih tidak memilih dalam rangka pemilu. Terdapat tiga faktor yang termasuk pada bagian ini, yaitu faktor yang terkait dengan administrasi dan teknis kepemiluan, faktor yang terkait dengan dimensi kandidasi pasangan calon, dan faktor yang terkait dengan aktivisme.

### **1. Administrasi dan Teknis Kepemiluan**

Bagaimana dimensi administrasi bisa menjelaskan tentang alasan pemilih untuk tidak hadir dalam pemilu? Tingginya angka voters abstention dalam pemilu-pemilu sebelum ini telah menjadi perhatian dari penyelenggara pemilu. Untuk konteks Medan, selain KPU berusaha meneruskan 'tradisi' memberikan himbauan memilih melalui aktivitas sosialisasi ke masyarakat, untuk tahun ini, KPU Kota Medan juga melakukan strategi administrasi berupa pencoretan hingga +/- 400.000 nama pemilih yang diyakini telah berpindah domisili, meninggal dunia, atau kehilangan hak pilih (misalnya karena menderita gangguan jiwa).

Langkah yang bertujuan tidak saja untuk menertibkan data pemilih namun juga menurunkan persentase absennya pemilih ini didasarkan pada PKPU No. 2 tahun 2017. Karena itu, dari sudut pandang KPU, langkah ini diyakini tidak akan menghapuskan hak pilih penduduk Kota Medan karena KPU masih membuka peluang bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT untuk memilih dengan KTP pada satu jam terakhir waktu pemungutan suara.

Pada tahun dimana kebijakan ini dilaksanakan, tingkat abstainsi pemilih memang mengalami penurunan yang sangat signifikan, atau peningkatan partisipasi yang sangat signifikan. Berbeda dari tren sebelumnya, tingkat abstention pada tahun ini turun signifikan dari sebelumnya. Tingkat VA tahun ini bahkan merupakan terendah dalam sejarah pemilu di Medan pasca reformasi. Pertanyaannya: apakah langkah ini telah maksimal? Sejauh mana isu administrasi menjadi alasan bagi para pemilih yang tidak hadir di TPS?

## 1.1. Pemutakhiran Data Pemilih dan Sejumlah Catatan

Penertiban data pemilih untuk keperluan Pilgub 2018 dilakukan dengan didasarkan pada DPT tahun 2015 yang masih memiliki banyak kecacatan. KPU Kota Medan berpendapat bahwa dalam pemilu sebelum 2018, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak mencoret nama-nama pemilih yang terindikasi telah pindah domisili, atau bahkan telah meninggal dunia dan mengalami gangguan jiwa karena khawatir akan dituduh melanggar hak memilih warga negara. Akibat dari kekhawatiran ini, DPT menjadi tidak valid. Orang-orang yang telah meninggal dunia dan pindah domisili masih terdaftar sehingga menyebabkan banyaknya pemilih 'hantu' dan pemilih ganda. Jumlah DPT juga menjadi sangat tinggi dan menyebabkan angka partisipasi dalam pemilihan menjadi sangat rendah.

Atas dasar itulah pada tahun 2018, KPU Kota Medan menginstruksikan agar PPDP bersikap lebih tegas dan berani. Proses identifikasi pemilih yang dilakukan dengan melibatkan para Kepala Lingkungan (Kepling) telah menghasilkan dihapuskannya 465.434 nama pemilih dari DPT Kota Medan. Sehingga, apabila tahun 2015 DPT Kota Medan mencatat keberadaan 1.985.096 pemilih, tahun 2018 DPT Kota Medan hanya mencatat 1.519.662 nama pemilih.

Pada tahun inilah untuk pertama kalinya setelah pemilu langsung dilakukan pasca reformasi, angka partisipasi pemilih di Kota Medan meningkat tajam, atau dengan kata lain, angka abstainnya pemilih menurun secara signifikan. Tahun 2018, angka abstainnya pemilih adalah 41,62 % atau jauh lebih rendah dibandingkan saat Pilgub 2013 yang mencapai 52.9%.

Namun demikian ada beberapa hal menarik terkait dengan penertiban DPT ini. *Pertama*, turunnya persentase abstainnya pemilih ini ternyata tidak semata karena jumlah DPT telah jauh berkurang. Sebab, jumlah pemilih pada tahun 2018 ini memang naik dibandingkan jumlah pemilih yang berpartisipasi pada tahun 2015. Pilgub 2018 diikuti oleh 916.109 pemilih atau sekitar 400 ribu lebih banyak dibandingkan jumlah pemilih pada tahun 2015 yang hanya diikuti oleh 507.350 orang. Karena itu, dari sudut pandang peserta pemilu, walaupun langkah tegas KPU harus diapresiasi, namun langkah ini bukanlah satu-satunya penjelas atas turunnya angka *abstention*. Dalam pandangan Walid, juru bicara dari paslon pemenang (Paslon 1) upaya KPU tidak berkorelasi langsung terhadap turunnya angka abstainnya pemilih:

"Jadi menurut saya rasional angka 9 juta itu (red. 900 ribuan jumlah pemilih di tahun 2018). Jadi benar cokit menghapus pemilih yang tercatat ganda, yang sudah pindah sudah tercatat, yang sudah meninggal masih tercatat, walaupun tidak semua juga. Tapi kemudian tidak linier dengan angka partisipasi. Nggak ada hubungannya dengan angka partisipasi. Partisipasi itu kan keinginan orang memilih. Bukan perkara dia sudah di cokit jadi dia memilih." (Walid, wawancara 5 Juli 2018)

Informan ini berpendapat bahwa turunnya angka *abstention* merupakan hasil kerja berbagai pihak. Jika peran KPU lebih tampak dari aktivitas sosialisasi memilih, banyak pihak juga turut andil dalam menekan angka *abstention*. Dari sisi peserta pemilu, keberhasilan ini tidak lepas dari strategi kandidat, termasuk dalam menggandeng partai yang memiliki jaringan pemilih yang kuat (PKS) dan penggunaan strategi yang menggunakan isu agama. Penggunaan isu ini, dalam pendapatnya justru efektif dalam menyentuh hati pemilih, menjadikan mereka yang sebelumnya apatis menjadi memiliki harapan terhadap pemilu dan oleh karenanya memutuskan untuk memilih pada Pilgub 2018.

*Kedua*, proses verifikasi data pemilih (coklit) yang dilakukan untuk merapikan DPT memiliki banyak tantangan teknis. Hal ini termasuk kesulitan para petugas untuk bertemu dengan banyak anggota masyarakat sehingga kemudian hanya mengandalkan pada keterangan Kepala Lingkungan (Kepling) dan informasi umum dari masyarakat sekitar. Tantangan lain yang cukup besar ditemui para petugas di kawasan perbatasan (wilayah-wilayah yang berhimpitan dengan kabupaten lain), misalnya dalam hal melakukan verifikasi data masyarakat yang tinggal di wilayah kabupaten tetangga namun masih memegang KTP Medan. Perbedaan wilayah administrasi pemerintahan ini menyulitkan proses verifikasi walaupun pemegang KTP Medan hanya berpindah di lokasi yang berhimpitan dengan Kota Medan. Hasilnya, di beberapa kawasan perbatasan, banyak data pemilih diduga belum valid sehingga berpengaruh terhadap tingkat *abstention*:

Tabel 1.

Contoh Tingkat Abstainnya Pemilih di Kawasan Perbatasan

Kecamatan	Kelurahan	No TPS	Jumlah Pemilih DPT	Jumlah Pemilih Abstain	% Pemilih Abstain
Medan Sunggal	Lalang	6	407	247	61%
		11	637	407	64%

Sumber Data: KPU Medan 2018

*Ketiga*, permasalahan dalam pembaharuan data hasil verifikasi. Proses coklit semestinya ditindaklanjuti dengan pembaharuan data DPT. Tetapi pada tahapan ini, beberapa masalah juga masih menjadi isu. Beberapa perwakilan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang hadir dalam FGD dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa rekomendasi penghapusan nama-nama pemilih (yang telah diverifikasi) seringkali tidak tercermin pada DPT yang telah direvisi. Tidak jarang, nama-nama yang telah mereka sisir dan merekomendasikan untuk dihapus masih muncul dalam DPT.

Dengan beragam permasalahan yang masih dihadapi oleh KPU, tidak mengherankan apabila DPT 2018 masih belum ideal. Beberapa permasalahan lama masih tampak seperti keberadaan ‘pemilih hantu’, pemilih ganda, dan pemilih yang tak terdaftar sebagai berikut.

#### 1.1.1. Keberadaan ‘Pemilih Hantu’

Rumitnya pembenahan DPT menyebabkan sejumlah cerita lama tentang DPT yang belum memuaskan berulang di tahun 2018 ini. Salah satunya adalah masih terdapatnya nama-nama pemilih dalam DPT yang diketahui telah meninggal dunia. Walaupun secara jumlah keberadaan mereka belum dapat dipastikan, tetapi beberapa indikasi ditemukan oleh para enumerator survey yang meminta konfirmasi kepada kepala lingkungan (kepling) atau tetangga dari pemilih yang namanya teridentifikasi tidak hadir di TPS.

#### 1.1.2. Keberadaan Pemilih Ganda

DPT tahun 2018 juga masih mencatat keberadaan pemilih ganda. Yaitu, nama-nama yang tercatat di dua tempat yang berbeda. Hal ini misalnya dinyatakan oleh salah satu informan dari kalangan tim sukses kandidat:

“Yang lucu yang saya lihat bahwa KPU ini kan ada sistemnya mulai dari ambil data di dinas, pemutakhiran, nah saya itu tinggal di daerah itu lebih dari 15 tahun, saya punya 2 data pilih. Jadi DPS saya terdaftar di dua tempat, di rumah lama dan di rumah baru disini.” (Brilian, wawancara 3 Juli 2018)

Lebih lanjut, informan ini mengatakan:

“Sudah habis pemutakhiran yang lucunya saya pernah memilih, saya juga pernah tidak memilih, artinya, saya ini penduduk jelas, pertama saya ini pengusaha, saya punya NPWP nah kenapa data saya tidak jelas, kenapa saya kadang tidak dapat.” (Brilian, wawancara 3 Juli 2018)

Meskipun pernyataan tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, namun hal tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan DPT seringkali membuat seorang pemilih merasa dapat atau tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

#### 1.1.3. Keberadaan Pemilih yang Tak Terdaftar

Selanjutnya, proses verifikasi data yang belum optimal juga berimplikasi pada munculnya para pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dan oleh karenanya harus menggunakan mekanisme yang mengandalkan pada KTP. Para pemilih ini baru dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP el atau Surat Keterangan kepada petugas pada satu jam terakhir pemungutan suara. Ironisnya, di tengah semangat mencoret nama pemilih dalam DPT, jumlah ‘Pemilih KTP’ sangat besar, yaitu mencapai 4-18% dari total pengguna hak pilih di tingkat kecamatan.

Tabel 1

Jumlah dan Persentase Pemilih Pengguna KTP 2018

No	Kecamatan	Total Pengguna Hak Pilih	Pemilih DPTB/ KTP-el/ Surat Keterangan	
			Jumlah	% terhadap Total
1.	Medan Tuntungan	38,669	4205	11%
2.	Medan Johor	59,087	8,088	14%
3.	Medan Amplas	49,314	8,865	18%
4.	Medan Denai	60,303	10,372	17%
5.	Medan Area	41,203	3957	10%
6.	Medan Kota	29,211	2161	7%
7.	Medan Maimun	20,786	853	4%
8.	Medan Polonia	21256	2398	11%
9.	Medan Baru	16,679	1998	12%
10.	Medan Selayang	42,453	6510	15%
11.	Medan Sunggal	46,668	7,429	16%
12.	Medan Helvetia	61,243	10,413	17%
13.	Medan Petisah	29,542	3641	12%
14.	Medan Barat	35,406	3335	9%
15.	Medan Timur	48,173	3881	8%
16.	Medan Perjuangan	44,006	6610	15%
17.	Medan Tembung	56,178	7735	14%
18.	Medan Deli	61,815	5775	9%
19.	Medan Labuhan	45,173	4,873	11%
20.	Medan Marelan	55,380	8082	15%
21.	Medan Belawan	34,747	3015	9%

Sumber: diolah dari Data KPU Kota Medan

Data di atas memang tidak dapat menunjukkan jumlah pemilih yang benar-benar tidak terdaftar di DPT dan jumlah pemilih yang terdaftar namun tidak mendapat/kehilangan Formulir C6. Namun, banyaknya jumlah pengguna mekanisme ini tetap menunjukkan bahwa sangat mungkin jumlah pemilih yang tidak tercatat pada DPT sangat banyak.

## 1.2. Sejauh Mana Aspek-Aspek Administrasi Berpengaruh terhadap Alasan Pemilih untuk Abstain dari Pemilu

Dengan adanya beberapa catatan di atas, pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana aspek-aspek administrasi (dan teknis) mempengaruhi pemilih untuk abstain dari pemungutan suara? Riset ini menemukan beberapa hal penting sebagai berikut:

### 1.2.1. DPT dan Efeknya terhadap Abstention

Sekalipun KPU telah melakukan banyak upaya untuk memperbaiki DPT dan mensosialisasikan keberadaan DPT, namun jumlah pemilih abstain yang menyatakan tidak mengetahui tentang apakah yang dimaksud dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) cukup tinggi:

Tabel 2

Pengetahuan Responden tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	190	47,5	48,5	48,5
Tidak	155	38,8	39,5	88,0
Tidak Tahu/TidakJawab	47	11,8	12,0	100,0
Total	392	98,0	100,0	
Missing System	8	2,0		
Total	400	100,0		

Catatan: pertanyaan P42

Tabel di atas menunjukkan bahwa setidaknya sekitar 39% pemilih yang abstain tidak mengetahui tentang apa yang disebut sebagai DPT. Lebih jauh riset ini juga menemukan bahwa dari mereka yang mengetahui tentang DPT, hanya sekitar 22 %

yang menjawab pernah mencari informasi mengenai tentang apakah dirinya telah tercatat di DPT.

Tabel 3

## Keaktifan Pemilih dalam Memastikan Dirinya Tercatat di DPT

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	199	49,8	50,8	50,8
Pernah	87	21,8	22,2	73,0
Tidak Pernah	96	24,0	24,5	97,4
Tidak Tahu/Tidak Jawab	10	2,5	2,6	100,0
Total	392	98,0	100,0	
Missing System	8	2,0		
Total	400	100,0		

Catatan: pertanyaan P43

Dua temuan ini menunjukkan bahwa sementara ini, informasi tentang DPT ternyata belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Demikian pula, kesadaran masyarakat untuk secara aktif memastikan bahwa dirinya telah/belum terdaftar di DPT sangat rendah.

### 1.2.2. Distribusi Formulir C6 yang Tidak Merata

Formulir model C6-KWK (Formulir C6) merupakan surat pemberitahuan pemungutan suara (PKPU No 8 tahun 2018). Surat yang berisi informasi tentang waktu dan tempat pemungutan suara ini diberikan kepada pemilih yang telah terdaftar pada DPT untuk ditunjukkan kepada petugas di TPS saat akan menggunakan haknya dalam pemilu. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, PKPU juga mewajibkan KPPS untuk mendistribusikan formulir ini selambatnya tiga hari sebelum pemungutan suara (Pasal 12).

Dalam survey 2018 ini, permasalahan yang terkait dengan distribusi Formulir C6 tidak tampak memengaruhi alasan bagi abstainnya pemilih. Survei menemukan bahwa hanya sekitar 8,3% dari responden yang mengaku bahwa masalah ini menjadi alasan mereka untuk abstain dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya.

Tetapi, hal ini bukan berarti tidak ada keluhan tentang distribusi Formulir C6 yang tidak merata. Dalam proses penelitian kualitatif, beberapa informan menuturkan keluhan warga yang tidak mendapatkan formulir ini. Misalnya, seperti yang diinformasikan oleh Dedy Syahputra. Informan yang berlatar belakang profesi sebagai wartawan lokal ini mengisahkan bahwa ia dan keluarganya telah

menempati sebuah rumah sejak tahun 2006. Tetapi, hingga tahun 2018, penghuni rumah sebelumnya lah yang mendapatkan Formulir C6 untuk memilih di TPS pada lingkungan rumah tersebut.

“Saya sudah menempati rumah saya yang sekarang ini sejak tahun 2006 tapi keluar C6 itu untuk penghuni sebelum saya. Itu berarti sudah 12 tahun” (Dedy Syahputra, wawancara 5 Juli 2018).

Belum meratanya distribusi Formulir C6 bahkan terjadi dalam satu keluarga, mengindikasikan masalah dalam pendataan pemilih dan distribusi formulir. Persoalan yang dinilai selalu ada di setiap pemilu ini terutama disayangkan oleh pihak peserta pemilu. Selain karena hal ini dianggap memperkecil peluang mendapatkan suara, permasalahan ini juga berpotensi menghadirkan ketidakpercayaan terhadap profesionalitas penyelenggara pemilu. Hal ini misalnya diungkapkan oleh salah seorang anggota tim sukses dari Paslon 2:

“Ini satu TPS *lo*, kita dapat 36 lembar (C6 yang tidak ada orangnya). Ini kedapatan saya ke rumah-rumah cek, pak ini tidak ada orangnya, sudah pindah, ini dikasih sama orang jaga malam. Kenapa udah terpotong? Kalau sudah terpotong berarti si penerima sudah jelas, saya angkat saja saya panggil semua, saya panggil kepling saya selidiki. Inilah saya dapat ini semua, ini satu TPS saja. Inilah yang saya temukan di lapangan. Petugas lapangan ini juga bukan orang sini jadi gimana dia tau mau kasih. Inilah yang jadi faktor. Tanda terima di tangan kepling, yang terima tidak tahu, dikasih ke orang yang jaga malam, di potongnya semua, kamu kasih lah ke rumah-rumah penduduk, dikasih-kasih tapi tidak ada orang.” (Brilian, wawancara 3 Juli 2018)

Dalam keterangan di atas, informan mempersoalkan distribusi Formulir C6 dalam kaitannya dengan prosedur penyerahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. PKPU No 8/2018 (Pasal 12 ayat 3) jelas menyebutkan bahwa pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir C6-KWK. Namun dalam realitanya, petugas mencari cara yang paling mudah walaupun hal itu berarti ia tidak mematuhi ketentuan yang telah dibuat oleh KPU.

Selanjutnya, persoalan distribusi Formulir C6 yang tidak merata juga memunculkan dugaan keberpihakan petugas pada salah satu calon dengan memanfaatkan pendapat umum masyarakat yang masih melihat formulir ini sebagai undangan atau syarat untuk dapat memilih:

“Jadi ada indikasi sengaja tidak diberikan C6 itu kepada pihak tertentu karena dia ditengarai sebagai konstituen pemilih cagub nomor sekian.” (Irwan, wawancara 3 Juli 2018)

Persoalan ini juga mencetuskan prasangka tentang pengibirian hak pilih warga:

“Yang lebih parah ini list daftar pemilih terus petugas yang membagikan kartu (C6) diberi formulir kosong. Sudah dikebiri hak pemilih” (Brilian, wawancara 3 Juli 2018)

Dari sisi penyelenggara pemilu, persoalan distribusi formulir merupakan tantangan yang tidak mudah diatasi. Belum adanya cara yang efektif untuk mengatasi dua permasalahan teknis kepiluan menjadikan permasalahan ini berulang pada setiap kali pemilu. Sinergi pendataan oleh petugas (KPPS, PPDP), kepala lingkungan (kepling), dan masyarakat dalam proses verifikasi, pengadinsitrasian data pemilih, dan pendistribusian Formulir C6 masih menjadi pekerjaan berat yang harus dikoordinasikan oleh penyelenggara pemilu.

Fakta di atas mempertegas masalah belum optimalnya sosialisasi tentang penggunaan KTP elektronik atau surat keterangan pengganti sebagai syarat memilih yang paling penting. Dalam keterangannya, seorang jurnalis lokal menyampaikan bahwa solusi dari KPU untuk pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan tidak mendapatkan Formulir C6 ini belum cukup terinformasikan dengan baik:

“Kalau saya ya, informasi itu saya dapatkan tapi lebih kepada informasi yg berkembang dari mulut ke mulut dalam (pemilu) gubernur ini ya, karena media-media yang semestinya digunakan oleh KPU untuk mensosialisasikan, saya tidak mendapat informasi dari itu” (Dedy Syahputra, wawancara 5 Juli 2018)

Tidak hanya itu, keengganan masyarakat yang tidak menerima Formulir C6 untuk memilih juga dikaitkan dengan alokasi waktu memilih yang tidak fleksibel (hanya pada satu jam terakhir di hari pemungutan suara) dan syarat keberadaan sisa surat suara pada waktu tersebut:

“(Mereka) datang diterima. Tapi, cuma, banyak *case* yang kita terima laporannya, ketika datang, mereka (KPPS) mengaku surat suara sudah habis. Jadi ada indikasi sengaja tidak di berikan C6 itu kepada pihak tertentu karena dia ditengarai sebagai konstituen pemilih cagub nomor sekian.” (Brilian, wawancara 3 Juli 2018)

### 1.2.3. Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang Tidak Selalu Memudahkan Pemilih

PKPU No 8/2018 telah mencantumkan detail aturan teknis untuk pemungutan suara termasuk dalam hal penentuan TPS. Terkait dengan abstention, salah satu isu yang penting dicermati adalah kemudahan pemilih untuk menjangkau lokasi pemungutan suara. Sehubungan dengan itu, pasal 10 mencantumkan bahwa setiap TPS dapat melayani paling banyak 800 orang pemilih dengan mempertimbangkan

beberapa aspek seperti: tidak menggabungkan desa/kelurahan/sebutan lain, kemudahan pemilih, aspek geografis, dan/atau jarak dan waktu tempuh menuju TPS.

Pada beberapa lokasi, daya tampung TPS yang cukup besar ini telah mendorong KPU untuk menggabungkan beberapa TPS menjadi satu demi efektivitas penyelenggaraan pemilu. Dalam sudut pandang KPU, langkah ini telah mempertimbangkan kemudahan akses dan pengetahuan pemilih karena TPS yang digabungkan berada pada lingkungan yang berdekatan.

Tetapi, langkah ini ternyata tidak sepenuhnya memudahkan pemilih. Dalam pandangan mereka, penentuan lokasi TPS (baik yang merupakan hasil penggabungan ataupun tidak) seringkali tidak sesuai dengan alamat tinggal pemilih (karena keterbatasan daya tampung TPS). Beberapa diantara mereka (sekitar 22% dari responden) juga mengaku tidak mengetahui lokasi TPS saat PilGub 2018. Walaupun, persentase ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan ingatan mereka saat Pilgub 2013, dimana sekitar 26 % responden mengaku tidak mengetahui lokasi TPS di tahun tersebut.

Tabel 3

Persentase Responden yang Tidak Mengetahui Lokasi TPS saat PilGub 2018

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	2	0,5	0,5	0,5
Ya	264	66,0	67,3	67,9
Tidak	89	22,3	22,7	90,6
3	1	0,3	0,3	90,8
5	1	0,3	0,3	91,1
Tidak Tahu/TidakJawab	35	8,8	8,9	100,0
Total	392	98,0	100,0	
Missing System	8	2,0		
Total	400	100,0		

Catatan: Pertanyaan P36

Tabel 4

Persentase Responden yang Tidak Mengetahui Lokasi TPS Saat PilGub 2013

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Gedung sekolah	49	12,3	12,5	12,5
Balai pertemuan masyarakat	60	15,0	15,3	27,3
Gedung tempat pendidikan selain sekolah	11	2,8	2,8	30,6
Kantor pemerintah	21	5,3	5,4	36,0
Kantor non-pemerintah	31	7,8	7,9	43,9
Lainnya	112	28,0	28,6	72,4
7,0	3	0,8	0,8	73,2
Tidak Tahu/TidakJawab	105	26,3	26,8	100,0
Total	392	98,0	100,0	
Missing System	8	2,0		
Total	400	100,0		

Catatan: Pertanyaan P37

Lokasi TPS terkadang juga tidak sangat mudah dijangkau oleh pemilih. Hal ini misalnya seperti yang digambarkan oleh informan dari LSM Pesada. Menurutnya, tidak jarang masyarakat merasakan sedikit kerepotan untuk mencapai lokasi TPS sehingga hal ini bisa mengurangi minat mereka untuk memilih:

“Jadi, misalnya kami ke Jalan Kayu Manis, untuk orang Simalingka itu menjengkelkan. Karena naik angkot pun tanggung. Orang pun tidak kenal di TPS sana. Itu kan kampung pinggiran Perumnas. Jadi dia kalau merasa tanggung, kalau ibu-ibu males.” (Dina, wawancara 4 Juli 2018)

Keluhan serupa diungkapkan oleh informan Brilian. Ia mengatakan bahwa dirinya tercatat dalam DPT yang tercatat untuk memilih pada TPS yang berlokasi jauh dari tempat tinggalnya:

“Biasanya saya TPS 1, ini rumah saya di depannya ada galon bensin, saya milih di sebelah galon, bank mandiri. Itu dulu saya bisa milih, sekarang saya milih sampai nyeberang ke UNIMED, lewat tol, kira-kira ada 4km lah saya milih dari rumah saya, padahal depan saya ada 3 TPS.” (Brilian, wawancara 3 Juli 2018).

Walaupun aspek administrasi dan teknis kepemiluan tidak dapat dikatakan sebagai aspek yang paling kuat menyebabkan pemilih abstain, namun upaya ini tetap penting dalam mendukung akurasi hasil pemilu. Terlepas dari latar belakang para informan yang mungkin berpengaruh terhadap keterangan yang diberikannya, hasil survey tetap memperlihatkan bahwa permasalahan administrasi dan teknis kepemiluan masih menyediakan ruang alasan bagi pemilih untuk tidak hadir ke TPS dan menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu.

## **2. Aspek Kandidasi Pasangan Calon**

### **2.1. Upaya Partai Politik dalam Membentuk Persepsi Masyarakat tentang Pasangan Calon**

Apa yang sudah dilakukan oleh partai politik untuk membentuk persepsi yang baik tentang calon yang dibawanya? Seperti disebutkan pada bab awal tulisan, aspek menarik dari Pilgub Sumatera Utara adalah tampilnya para politisi nasional sebagai calon gubernur yang masing-masing berpasangan dengan politisi lokal. Tim pemenangan kedua calon ini kemudian melakukan strategi yang berbeda untuk mendapatkan dukungan pemilih.

Tim pemenangan Paslon 1 tampak fokus menggarap figur karena melihat bahwa hal ini merupakan aspek kunci untuk menarik pemilih. Hasil identifikasi mereka menemukan

bahwa terdapat dua hal penting yang dapat mereka gunakan sebagai strategi memenangkan suara. *Pertama*, strategi untuk mengolah figur paslon agar dapat memenuhi harapan pemilih. Dalam pandangan mereka, masyarakat Medan mengidamkan profil pemimpin yang kuat dan cenderung maskulin. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan pandangan umum masyarakat yang selalu melihat dirinya sebagai 'kepala'. Sehingga, bagi mereka profil gubernur harus menunjukkan kemampuan mengatur 'para kepala ini' (wawancara dengan Walid, 5 Juli 2018). Untuk itu tim pemenangan mengolah profil Edy Rahmayadi dan Musa Rajeksyah untuk memenuhi hasil identifikasi tersebut. Penekanan profil Edy Rahmayadi sebagai jenderal TNI yang rela mengajukan pensiun dini untuk mengabdikan pada daerah asalnya (Medan) dan Musa Rajeksyah sebagai pengusaha sekaligus pemimpin dari organisasi paramiliter Pemuda Pancasila di Medan menjadi penting.

*Kedua*, tim pemenangan Paslon 1 juga menggunakan strategi politik keagamaan (terutama berbasis Islam) karena melihat bahwa strategi ini cocok diterapkan untuk masyarakat muslim Medan. Semakin berkembangnya Islam puritan di Medan mendorong mereka memformat strategi kampanye dalam bentuk aktivitas agama. Strategi ini diyakini efektif dalam menarik pemilih karena agama mampu menyentuh hati dan menggerakkan para pemilih, bahkan mereka yang selama ini abstain (wawancara dengan Walid, juru bicara tim pemenangan Paslon 1 5 Juli 2018). Sejalan dengan itu, tim pemenangan Paslon 1 memanfaatkan dengan sangat baik penghujung masa kampanye yang bersamaan dengan Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dengan menyelenggarakan dua momentum penting yaitu pengajian akbar (hari terakhir masa kampanye) dan gerakan Shalat Shubuh Berjamaah (pada hari pemungutan suara). Dua kegiatan yang menampilkan dua pendakwah kelahiran Sumatera Utara yang tengah dikenal di tingkat nasional yaitu Tengku Zulkarnain (sekretaris jenderal MUI) dan Abdul Somad Batubara ini berhasil menarik ribuan massa<sup>6</sup>.

Berbeda dengan tim pemenangan Paslon 1, Paslon 2 (Djoss) yang juga melihat figure kandidat sebagai aspek kunci dari keberhasilan tampak lebih mengolah aspek ke-Jawa-an dari calon gubernur Djarot Syaiful Hidayat. Penekanan pada aspek ke-Jawa-an calon gubernur bukan tanpa alasan. Medan, merupakan salah satu kawasan di Sumatera Utara yang banyak dihuni oleh penduduk keturunan Suku Jawa<sup>7</sup>. Saat ini penduduk Jawa mencapai sekitar 30% dari seluruh penduduk Medan (sumber...). Profil Djarot Syaiful Hidayat yang dikenal secara nasional pasca hiruk pikuk Pilkada DKI Jakarta 2012 dan 2017 diyakini memiliki popularitas yang tinggi:

---

<sup>6</sup> Sejumlah sumber menempatkan kedua pendakwah ini sebagai pendakwah berhaluan keras.

<sup>7</sup> Medan merupakan kawasan tujuan pertama dari migrasi penduduk Jawa secara besar-besaran saat perusahaan-perusahaan dari Belanda membuka perkebunan-perkebunan di kawasan pantai Timur Sumatera Utara sekitar akhir abad 18 atau awal abad 19. Lihat misalnya Reed (1979), Stoler (1993).

“Pro kontra nya Djarot dikaitkan dengan Ahok atau apa dia, di punya popularitas cukup tinggi. Begitu dia masuk (Djarot) medsos mulai ramai tu, joblos pak kumis. Gairahnya sudah mulai tinggi.” (Irwan, wawancara 3 Juli 2018)<sup>8</sup>

Profil Djarot Syaiful Hidayat yang telah dikenal secara nasional dipadukan dengan profil politisi dan pengusaha lokal yang melekat pada Sihar Sitorus. Penguatan profil tokoh nasional-lokal ini juga diperkuat dengan penguatan aspek lintas kultur dan agama (Jawa-Batak dan Muslim-Katolik) diantara keduanya.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa perbedaan mencolok dari kandidasi Pilgub 2018 dengan sebelumnya (2013 dan 2008) adalah bahwa kali ini kedua kandidat gubernur adalah politisi yang dikenal secara nasional. Baik Edy Rahmayadi maupun Djarot Syaiful Hidayat kerap muncul di media karena kontroversi yang menyertai sepak terjang politik mereka. Faktor inipun diakui sebagai salah satu penjas penting mengapa angka abstention pada tahun 2018 menurun tajam:

“Ini tidak bisa lepas dari pertama kenapa angka partisipasi bisa tinggi, yaitu figur. Tentu juga isu-isu yang tajam karena dua calon adalah tokoh nasional, bukan tokoh lokal pak Edi tokoh nasional, pak Djarot adalah tokoh nasional.” (Walid, wawancara 5 Juli 2018)

Selain karena popularitas, hal lain yang dianggap mampu menekan angka abstention adalah isu-isu yang digarap oleh keduanya. Isu yang dimaksud tidak sebatas pada visi misi yang ditawarkan, namun juga isu agama, etnisitas, dan putra daerah dinilai mampu membangkitkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Berikut pendapat informan mengenai pasangan calon:

“Semuanya lah baik calonnya lebih menarik, isu yang di mainkan juga menarik, terlepas dari isunya baik atau tidak. Tapi itu membuat gairah orang lebih besar.” (Irwan, wawancara 3 Juli 2018)

Penjelasan serupa juga diberikan oleh informan Brilian:

“Soal 55% orang memilih dibandingkan tahun lalu hanya 29-30% itu situasinya berbeda. Kenapa? Pasangan Edi dan Ijack, pasangan Djarot dan Sihar membuat orang semangat untuk datang untuk memilih namun justru dihilangkan.” (Bapak Brilian, wawancara 3 Juli 2018)

---

<sup>8</sup> Lebih lanjut, informan Irwan menambahkan bahwa popularitas Djarot sebagai Gubernur DKI Jakarta pengganti Ahok yang di penjara karena kasus penistaan agama menjadi faktor penting bagi untuk popularitasnya di Medan.

Tetapi di luar seluruh upaya kandidasi dari kedua paslon dan pengakuan terhadap kelebihan para paslon yang dinilai berkontribusi terhadap menurunnya abstention, fakta masih menunjukkan bahwa pemilih abstain masih ada. Jumlah mereka juga masih terbilang tinggi, walaupun kini tidak lagi menjadi yang tertinggi di Sumatera Utara maupun di Indonesia.

2.2. Seberapa berpengaruh dimensi kandidasi (pasangan calon) terhadap keputusan orang untuk tidak memilih (abstain) dalam pemilu?

Survey 2018 secara umum tidak menunjukkan bahwa paslon kandidat gubernur merupakan faktor yang menyebabkan mereka abstain dalam pemilu. Tetapi, survey ini mengungkapkan imajinasi para pemilih yang abstain tentang seperti apakah sosok pemimpin gubernur yang ideal.

Tabel 5  
Alasan Memilih Kepala Daerah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Karena figure calon legislatifnya secara personal (pribadi)	245	61,3	62,5	62,5
Karena partai politik pengusungnya	43	10,8	11,0	73,5
3	8	2,0	2,0	75,5
Tidak Tahu/TidakJawab	96	24,0	24,5	100,0
Total	392	98,0	100,0	
Missing System	8	2,0		
Total	400	100,0		

Catatan: Pertanyaan P60

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden (sekitar 62%) melihat figure sebagai aspek paling penting yang harus ada dalam diri calon gubernur. Survey juga menemukan bahwa profil figure yang dimaksud terutama adalah yang jujur (sekitar 16%), merakyat (sekitar 15%), serta bijaksana (sekitar 14%).

Tabel 6

## Harapan untuk Kepala Daerah Sumatera Utara Lima Tahun ke Depan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Alim	25	6,3	6,4	6,4
Berpengalaman	35	8,8	8,9	15,3
Berprestasi	38	9,5	9,7	25,0
Bijaksana	58	14,5	14,8	39,8
Usia	2	0,5	0,5	40,3
Inovatif	15	3,8	3,8	44,1
Jujur	64	16,0	16,3	60,5
Menarik/tampan/cantik	2	0,5	0,5	61,0
Merakyat	60	15,0	15,3	76,3
Pintar	10	2,5	2,6	78,8
Santun	4	1,0	1,0	79,8
Tegas	12	3,0	3,1	82,9
Terbukti	22	5,5	5,6	88,5
Lainnya	2	0,5	0,5	89,0
Tidak Tahu/TidakJawab	43	10,8	11,0	100,0
Total	392	98,0	100,0	
Missing System	8	2,0		
Total	400	100,0		

catatan: pertanyaan P61

Lebih lanjut, harapan tentang figur juga terefleksikan pada pertanyaan tentang seperti apakah sifat-sifat pemimpin daerah yang menurut mereka paling penting. Diantara beberapa opsi, sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa memperhatikan keinginan rakyat (sekitar 28%), bersih dari korupsi (sekitar 23%) serta memiliki program dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (sekitar 19%) merupakan sifat-sifat yang paling harus dipenuhi oleh seorang pemimpin.

Tabel 7

## Aspek Paling Penting yang Harus Dimiliki oleh Kepala Daerah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Memperhatikan keinginan rakyat	111	27,8	28,3	28,3
Punya program dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat	78	19,5	19,9	48,2
Mewakili kepentingan lapisan masyarakat miskin maupun kaya	20	5,0	5,1	53,3
Bersih dari korupsi	93	23,3	23,7	77,0
Dipimpin oleh orang-orang yang mampu memecahkan masalah-masalah bangsa	17	4,3	4,3	81,4
Berasas Pancasila	13	3,3	3,3	84,7
Mewakili rakyat kecil saja, tidak mewakili rakyat dari lapisan atas	10	2,5	2,6	87,2
Mewakili semua kelompok suku bangsa dan kedaerahan yang beragam	10	2,5	2,6	89,8
Mewakili semua kelompok agama yang berbeda-beda	9	2,3	2,3	92,1
Mewakili hanya kelompok Islam	4	1,0	1,0	93,1
Organisasinya kuat/rapi	2	0,5	0,5	93,6
Lainnya	1	0,3	0,3	93,9
Tidak Tahu/Tidak Jawab	24	6,0	6,1	100,0
Total	392	98,0	100,0	
Missing System	8	2,0		
Total	400	100,0		

Catatan: pertanyaan P62

Walaupun penilaian terhadap figur para kandidat Pilgub 2018 bukan alasan utama para pemilih untuk abstain, tetapi hal-hal di atas mengindikasikan bahwa penilaian

terhadap figure kandidat tidak mampu mendorong keaktifan pemilih untuk berpartisipasi pada pemungutan suara.

Selanjutnya, walaupun Paslon 1 menilai bahwa agama merupakan aspek penting yang dapat menarik perhatian pemilih, hal itu tidaklah terlalu berlebihan. Survey terhadap para pemilih abstain memang menunjukkan bahwa sebagian besar responden (sekitar 28%) menilai bahwa faktor agama merupakan faktor yang paling mempengaruhi mereka dalam menentukan pilihan seandainya mereka menggunakan hak pilih saat Pilgub 2018 lalu.

Tabel 8

Faktor Paling Mempengaruhi Pilihan Jika Memilih pada Pilgub 2018

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Agama	111	27,8	28,3	28,3
Gender	2	0,5	0,5	28,8
Usia	3	0,8	0,8	29,6
Suku	27	6,8	6,9	36,5
Rekam jejak	45	11,3	11,5	48,0
Asal daerah	16	4,0	4,1	52,0
Ideologi	5	1,3	1,3	53,3
Visi misi kandidat	100	25,0	25,5	78,8
Lainnya	5	1,3	1,3	80,1
11	1	0,3	0,3	80,4
Tidak Tahu/Tidak Jawab	77	19,3	19,6	100,0
Total	392	98,0	100,0	
Missing System	8	2,0		
Total	400	100,0		

catatan: pertanyaan P64

Di luar itu, faktor visi misi kandidat juga masih dianggap penting, setidaknya diakui oleh sekitar 25% responden. Namun demikian, kedua faktor tersebut ternyata juga tidak mampu menjadi dorongan utama para pemilih yang pada akhirnya abstain ini untuk menggunakan hak pilih pada Pilakda 2018 yang lalu.

### 2.3. Seberapa Besar Pengaruh Partai Politik dalam Abstainnya Pemilih?

Terdapat kemungkinan bahwa mereka yang abstain tidak terpapar sosialisasi oleh parpol. Temuan di atas tetapi hal ini tidak cocok dengan temuan upaya parpol yang cenderung menggunakan agama untuk mengajak orang berpartisipasi (memilih calon tertentu)/ Sehingga hal ini menandakan bahwa mereka yang abstain tidak tergabung atau terpapar oleh ajakan partai politik maupun ormas dan LSM yang bekerja untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Tabel 9

Organisasi Sosial atau Politik yang Paling Mendominasi Kegiatan Sosial di Sekitar Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Parpol	4	1,0	1,0	1,0
	Pemuda Pancasila	119	29,8	30,4	31,4
	Organisasi Mahasiswa	192	48,0	49,0	80,4
	Karang Taruna	22	5,5	5,6	86,0
	PKK	4	1,0	1,0	87,0
	Lainnya	1	0,3	0,3	87,2
	Tidak Tahu/TidakJawab	50	12,5	128	100,0
	Total	392	98,0	100,0	
Missing	System	8	2,0		
Total		400	100,0		

### 3. Aktivisme sebagai Penjelas dari Abstention

KPU selama ini merupakan pihak yang paling dikenal sebagai yang menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi. Tetapi di luar KPU, terdapat dua aktor lain yang turut berkontribusi dalam mendorong partisipasi, yaitu partai politik dan masyarakat sipil. Jika partai politik yang tergabung dalam tim pemenangan telah dibahas sebelumnya, bagian ini akan memfokuskan diri pada seberapa jauh peran aktivisme dari masyarakat sipil.

#### 3.1. Dimensi Aktivisme yang Bekerja selama Pilgub 2018 di Medan

Selama penyelenggaraan Pilgub 2018, kalangan masyarakat sipil (LSM ataupun kalangan kampus) tampak melakukan kontak dengan KPU Sumatera Utara maupun KPU Medan. Hal itu dalam rangka turut mendukung agenda kelancara pemilu termasuk mendorong partisipasi untuk Pilgub 2018. Sayangnya hingga kini belum ada data yang

komprehensif tentang berapa banyak pihak-pihak lain yang secara langsung dan tidak langsung memasukkan agenda pemilu sehingga berkontribusi dalam menekan angka abstention atau bahkan mengajak masyarakat untuk abstain dalam pemilu. Namun demikian, menarik bahwa riset ini menemukan LSM yang menjalankan agenda pendidikan politiknya sebagai agenda sisipan.

Salah satu contoh adalah LSM PESADA. LSM perempuan ini bergerak secara sembunyi-sembunyi untuk menyumbangkan tenaga secara sukarela sehingga angka partisipasinya meningkat. Salah satunya adalah LSM PESADA, yaitu LSM perempuan yang memiliki misi pendidikan dan penyadaran kepada perempuan untuk mewujudkan kesetaraan serta keadilan gender. Perempuan tak luput dari maraknya isu sara yang menyelimuti dunia perpolitikan Medan. Melihat hal itu, PESADA merasa prihatin dan berupaya melakukan pendidikan masyarakat khususnya perempuan mengenai pentingnya kesadaran politiknya. Mereka berkerja menyasar masyarakat akar rumput, bukan tidak vocal namun memang tidak terekspose media.

Yang menarik, riset Voters Abstention pada Pilgub 2018 ini juga mencatat bahwa terdapat gerakan sukarela masyarakat sipil. Informan Walid mengatakan banyak warga yang bergerak sendiri tanpa dibayar dan tanpa dikomandoi. Tidak hanya bergerak untuk memilih namun juga termasuk bergerak untuk mengkampanyekan kepentingannya sendiri. Salah satu faktor yang mendukung peningkatan angka partisipasi masyarakat Medan adalah dengan adanya gerakan masyarakat sipil. Mereka tanpa ada perintah dan tanpa ada komando, dengan sendirinya berusaha mengajak orang lain untuk memilih pasangan calon yang mereka pilih.

Informan Brilian memperoleh fakta mengenai gerakan masyarakat secara sukarela pada paslon nomor urut 2. Berikut pernyataannya:

“Jadi memang ada orang-orang yang simpatik lalu membuat gerakan sendiri tak perlu pak Djarot tau. Ada beberapa orang yang pengusaha yang pemikirannya ingin perubahan mengusulkan rekrut wartawan bantu pemberitaan pak Djarot gaji akan mereka tanggung. Pak Djarot tidak tau itu, loyal ini. Mereka ada gairahnya, ini perubahan ini.” (Bapak Brilian, wawancara 3 Juli 2018)

Sukarelawan yang mendukung pasangan calon nomor 2, sesuai dengan pernyataan tersebut adalah pengusaha. Mereka mengharapkan adanya perubahan pada daerah mereka. Semangat perubahan memicu gerakan secara sukarela untuk turut bekerja mengkampanyekan Djarot dengan cara membiayai wartawan. Wartawan dipekerjakan untuk meliput kegiatan Djarot dan memberitakannya pada seluruh masyarakat sehingga tingkat rekognisi masyarakat dapat meningkat.

Selain masalah semangat perubahan terhadap dunia perpolitikan, pemicu gerakan sukarela oleh masyarakat sipil adalah agama. Salah satu masyarakat yang aktif

berkampanye secara mandiri adalah tokoh Ustadz. Berkaitan dengan mereka, informan Dedy mengatakan:

“Para ustad yang berceramah di masjid itu umumnya tidak memiliki hubungan dengan paslon nomor 1 apalagi dengan partai politik nomor satu mereka hanya bergerak sendiri-sendiri, voluntarism karena merasa tersentuh kepentingan-kepentingannya tadi, soal agama.” (Dedy Syahputra, wawancara 5 Juli 2018)

Ustadz sama sekali tidak memiliki hubungan secara langsung dengan pasangan calon tertentu. Kepentingan agama menyebabkan mereka bergerak meskipun tanpa dikomandoi. Pun setelahnya isu-isu berkaitan dengan agama akan terus berputar didalam masyarakat. Bagaikan rantai yang tidak terputus, isu keagamaan akan terus bergulir secara otomatis dan masyarakat secara tidak langsung menjadi agen kampanye tanpa koordinasi. Pasangan calon yang berafiliasi dengan agama akan diuntungkan oleh isu agama yang menular tersebut.

Banyaknya gerakan masyarakat diluar organisasi politik, oleh informan Dedy dipahami sebagai indikasi kuat bangkitnya gerakan masyarakat sipil di Medan. Menurutnya, kinerja masyarakat sipil bergerak dalam ranah yang fungsional, bukan terlembaga. Gerakan masyarakat dilakukan dalam agenda-agenda yang memang telah berfungsi sebelumnya tanpa harus secara khusus diadakan. Contohnya seperti kegiatan pengajian, perkumpulan warga dan lain sebagainya. Gerakan tersebut tidak terlembaga melainkan gerakan yang tidak terorganisir namun banyak dilakukan oleh masyarakat yang bahkan tidak saling berhubungan satu sama lain. Indikasi bangkitnya gerakan masyarakat sipil juga terlihat dari mandeknya LSM-LSM yang dulunya vocal. Berkaitan dengan hal tersebut, informan Dedy mengatakan:

“Jadi sejak pemerintahan jokowi itu hampir dikatakan lsm yang dijamin SBY aktif, vokal sangat kritis hampir tidak terdengar di media suaranya, justru yg muncul civil society. Tidak terorganisir tapi banyak.” (Dedy Syahputra, wawancara 5 Juli 2018)

Informasi mengenai keberadaan gerakan masyarakat sipil dalam pemilihan Medan lalu, menunjukkan peningkatan gairah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tidak menutup kemungkinan, masih terdapat lebih banyak lagi berbagai gerakan masyarakat sipil yang tidak terpantau. Peningkatan angka partisipasi masyarakat Medan menjadi pertasi dari banyak pihak. Peran-peran tokoh masyarakat, pengusaha, dan LSM turut berperan penting dalam penyelenggaraan pilgubsu 2018 di Medan.

### 3.2. Bagaimana Dimensi Aktivisme Berimplikasi pada Alasan Orang untuk Abstain dalam Pemilu?

Salah satu temuan menarik dari survey adalah adanya pengakuan bahwa terdapat bujukan dari keluarga ataupun lingkungan tempat tinggal untuk tidak memilih. Walaupun persentase untuk dua hal tersebut kecil, namun hal ini menandakan bahwa abstainnya pemilih juga disebabkan oleh faktor bujukan. Dalam survey 2018, tampak bahwa responden yang mengakui adanya faktor tersebut adalah 2-3 persen.

**P21 Mengapa Bapak/Ibu/Saudara TIDAK DATANG ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu Gubernur Sumatera Utara pada 27 Juni 2018 lalu?**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Mengikuti atau bujukan dari keluarga/kerabat dekat	14	3,5	3,6	3,6
	Mengikuti atau bujukan dari lingkungan tempat tinggal/tetangga pemukiman	9	2,3	2,3	5,9
	Merasa tidak akan mengubah/memberikan dampak apapun terhadap kehidupan	51	12,8	13,0	18,9
	Tidak kenal dengan kandidat	21	5,3	5,4	24,2
	Kesibukan Bekerja	134	33,5	34,2	58,4
	Tidak Terdaftar di TPS atau hambatan administrasi lain	31	7,8	7,9	66,3
	Kepercayaan dan keyakinan agama untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu	1	,3	,3	66,6
	Lainnya	87	21,8	22,2	88,8
	TT/TJ	44	11,0	11,2	100,0
	Total	392	98,0	100,0	
Missing	System	8	2,0		
Total		400	100,0		

Hal di atas tidak saja mengindikasikan bahwa lingkungan sosial (keluarga dan tempat tinggal) masih memainkan peranan, walaupun terbatas. Tetapi, ketidakterhubungan mereka dengan pihak-pihak yang tampak mendukung pemilu juga berpengaruh. Hal ini misalnya dapat dikaitkan dengan pengakuan responden bahwa sebagian besar dari mereka (beragama Islam dan Kristen/Katolik) mengaku tidak memiliki kedekatan dengan ormas agama. Sebagian besar masyarakat beragama Islam (sekitar 26%) menjawab bahwa mereka tidak tergabung dalam organisasi berbasis agama. Sementara itu

sebagian besar responden yang beragama Kristen/Katolik (sekitar 18%) mengaku tidak memiliki kedekatan dengan ormas agama.

Apakah Bapak/Ibu/Saudara merasa sebagai anggota atau merasa dekat dengan ormas agama

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	139	34,8	35,5	35,5
	Al Irsyad	2	,5	,5	36,0
	Hizbut Tahrir Indonesia	1	,3	,3	36,2
	Jamaah Tabligh	2	,5	,5	36,7
	Masyumi (NU)	1	,3	,3	37,0
	Muhammadiyah	27	6,8	6,9	43,9
	Nahdlatul Ulama	41	10,3	10,5	54,3
	Nahdlatul Wathon	1	,3	,3	54,6
	Persis	1	,3	,3	54,8
	Organisasi Islam lainnya	15	3,8	3,8	58,7
	Tidak ikut organisasi Islam apapun	103	25,8	26,3	84,9
	tt/tj	59	14,8	15,1	100,0
	Total	392	98,0	100,0	
Missing	System	8	2,0		
Total		400	100,0		

Apakah bapak/ibu/ Saudara merasa sebagi anggota atau merasa dekat dengan Ormas agama

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	306	76,5	78,1	78,1
	Badan Musyawarah Kristen Indonesia (BMKI)	2	,5	,5	78,6
	Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI)	1	,3	,3	78,8
	Gerakan Siswa Kristen Indonesia (GSKI)	3	,8	,8	79,6
	Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA)	1	,3	,3	79,8
	Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI)	1	,3	,3	80,1
	Pemuda Katolik	2	,5	,5	80,6
	8.Persatuan Intelektual Kristen Indonesia (PIKI)	2	,5	,5	81,1
	lainnya	1	,3	,3	81,4
	TT/TJ	73	18,3	18,6	100,0
	Total	392	98,0	100,0	
Missing	System	8	2,0		
Total		400	100,0		

Menurut Bapak/Ibu/Saudara organisasi sosial atau politik apa yang paling mendominasi kegiatan sosial di sekitar tempat tinggal Bapak/Ibu/Saudara

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PARPOL	4	1,0	1,0	1,0
	PEMUDA PANCASILA	119	29,8	30,4	31,4
	ORGANISASI MAHASISWA	192	48,0	49,0	80,4
	KARANG TARUNA	22	5,5	5,6	86,0
	PKK	4	1,0	1,0	87,0
	LAINNYA	1	,3	,3	87,2
	TT/TJ	50	12,5	12,8	100,0
	Total	392	98,0	100,0	
Missing	System	8	2,0		
Total		400	100,0		

Sementara itu, terdapat kemungkinan bahwa mereka yang abstain tidak terpapar sosialisasi oleh LSM dan ormas yang mendorong partisipasi pemilih. Dalam pengakuan para responden, kelompok yang dominan di lingkungan tempat tinggal mereka adalah mahasiswa (sekitar 49%) dan ormas Pemuda Pancasila (sekitar 30%). Namun, sejauh ini tidak ditemukan bukti bahwa kelompok mahasiswa maupun ormas Pemuda Pancasila telah melakukan bujukan kepada masyarakat untuk tidak memilih. Para aktor yang tergabung dalam Pemuda Pancasila bahkan kemungkinan besar justru mengajak masyarakat untuk berpartisipasi (memilih Paslon 1) karena pemimpin organisasi ini menjadi kandidat wakil gubernur dari Paslon 1.

#### 4. Penutup

Aktivisme dalam dalam PILGUBSU 2018, muncul sebagai respon atas kegamangan masyarakat terhadap pasangan calon. Dalam beberapa kasus kegamangan muncul sebagai wujud perlawanan, namun di sisi lain hal tersebut menunjukkan ada/tidak adanya keterlibatan aspek institusional yang menyentuh pemilih abstain.

Peningkatan partisipasi adalah faktor agama dan suku pada calon Gubernur. Pasangan Edy berkomposisi muslim dengan muslim. Sedangkan pasangan Djarot berkomposisi Muslim dan Kristen. Oleh sebab itu, salah satu wacana yang bergulir di masyarakat berhubungan dengan pembelaan agama. Selain perbedaan agama, juga faktor kesukuan. Djarot dianggap sebagai orang luar karena memang berasal dari Jawa. Oleh karena itu, selain agama juga bergulir isu kesukuan dimana terdapat wacana penolakan terhadap pemimpin yang bukan asli orang Sumatera Utara.

Politik Jakarta terasa hingga ke Medan. Polarisasi suara antara muslim dan Kristen dikatakan oleh banyak informan merupakan dampak fenomena Jakarta. Citra Djaro dalam pilgubsu tak lepas dari Ahok yang tersandung kasus penistaan agama. Djarot sebagai wakilnya turut memperoleh citra buruk dimata Masyarakat. Beberapa orang tidak setuju Djarot memimpin, selain faktor suku juga karena faktor kekhawatiran. Terdapat masyarakat yang merasa Medan akan diobrak-abrik apabila Djarot memimpin

Faktor berikutnya yang mendukung peningkatan partisipasi adalah adanya aksi masyarakat sipil dalam berkampanye. Meluasnya isu agama dalam pilgubsu, menyebabkan ustadz-ustadz secara sukarela turut menyampaikan pandangan politiknya kepada jemaahnya. Selain itu juga ditemukan warga yang tanpa dikomandoi memasang umbul-umbul yang berisikan ajakan untuk memilih sesuai dengan pandangan mereka masing-masing. Tidak seluruh masyarakat sipil bergerak dalam lingkup agama, terdapat LSM Pesada yang secara sukarela berusaha melakukan pendidikan politik terhadap perempuan yang kerap menjadi subjek mobilisasi politik oleh partai maupun ustadz. Ibu-ibu adalah pemilih potensial yang kerap mengikuti pengajian dan cenderung mengikuti perintah ustadz. Oleh karena itu Pesada berusaha mengadakan pendidikan terhadap mereka guna meningkatkan kesadaran politik.

Meskipun isu SARA merupakan hal yang sensitive dan penggunaannya cenderung dilarang dalam pemilihan, namun secara nyata dianggap mendorong partisipasi masyarakat Medan. Angka partisipasi masyarakat Medan meningkat melalui faktor calon, agama/suku, dan gerakan masyarakat sipil yang saling mempengaruhi satu sama lain. Lacarnya isu sara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tak lepas dari kultur Masyarakat setempat. Dikonfirmasi oleh informan, bahwa kultur sara telah melekat erat dalam masyarakat Batak yang memiliki banyak sub suku.

Peningkatan partisipasi masih menyisakan absensi. Hampir setengah Masyarakat Medan tidak berpartisipasi dalam pemilihan lalu. Terdapat berbagai penyebab dari masih banyaknya absensi masyarakat. Masalah pertama adalah masalah administrasi. Banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai DPT. Selain itu juga disebabkan karena kartu C6 yang tidak merata. Pengetahuan masyarakat mengenai peraturan pemilihan juga masih kurang. Sehingga permasalahan administrasi yang seharusnya dapat diselesaikan dengan sedikit usaha, menjadi tidak terakses karena ketidaktahuan masyarakat.

Faktor kedua adalah sosialisasi KPU dan parpol yang masih kurang. Sosialisasi KPU dinilai sangat tradisional, monoton dan tidak menarik. Pelaksanaan sosialisasi juga cenderung kurang karena hanya pada beberapa tempat. Umbul-umbul yang dipasang juga dinilai kurang menarik perhatian masyarakat. Selain parpol juga masih kurang sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi. Mereka hanya terfokus untuk memenangkan calonnya masing-masing tanpa memperdulikan pemilih yang memang sebelum sudah tidak tertarik untuk memilih.

Kehadiran pemilih abstain pada Pilgub Sumatera Utara 2018 di Medan diwarnai dengan hadirnya sejumlah faktor non-behavioral. Faktor-faktor ini dikategorikan sebagai faktor institusional mengingat sifatnya yang melibatkan aspek pelebagaan yang mempengaruhi tindakan pemilih tidak memilih dalam rangka pemilu. Terdapat tiga faktor yang termasuk pada bagian ini, yaitu faktor yang terkait dengan administrasi dan teknis kepemiluan, faktor yang terkait dengan dimensi kandisasi pasangan calon, dan faktor yang terkait dengan aktivisme.

# Bab 5. Kesimpulan dan Rekomendasi

## 1. Kesimpulan

Kajian ini berangkat dari fenomena tentang tingkat partisipasi masyarakat kota Medan dalam setiap gelaran pemilihan umum (pemilu) yang selalu berada di persentase >40%. Oleh karenanya, kajian ini dilakukan untuk melihat rasionalisasi dari masyarakat kota Medan yang tidak hadir dalam pemilu. Argumentasi besar dari kajian ini mengungkapkan bahwa terdapat dua perihal besar yang memunculkan pemilih tidak hadir (voters abstention) baik secara behavioral (tingkah laku) maupun institusional (kelembagaan). Keduanya tidak dapat dipisahkan, justru keduanya saling berkaitan karena hadirnya voters abstention di kota Medan tidak terlepas dari permasalahan institusional yang mempengaruhi terhadap tingkah laku pemilih maupun sebaliknya.

Berdasarkan dari data yang terhimpun baik kuantitatif dan kualitatif, temuan studi mengungkapkan beberapa poin penting.

1) Inkonsistensi aspek teknis dan administrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara tidak bekerja secara maksimal menjelang gelaran pemilu. Penggunaan cara sosialisasi yang masih tradisional, monoton dan tidak menarik menyebabkan munculnya pemilih tidak hadir. Bukti atas argumentasi ini terlihat dari pencocokan dan penelitian (Coklit) data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak ter-update. Faktor pendorong lainnya yang menyebabkan hal ini terjadi adalah perselisihan pemahaman teknis kepemiluan yang mempengaruhi abstention seperti pemakaian E-KTP untuk memilih.

2) Kampanye kandidat dan tim sukses pasangan calon menggunakan isu rasial/sentimen suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). Persaingan politik yang terjadi di Jakarta dengan penggunaan politik identitas (agama dan suku) turut menjamur kepada pemilihan gubernur (pilgub) Sumatera Utara tahun 2018. Wacana agama (pasangan calon beda agama) dan suku (Djarot berasal dari pulau Jawa) dimanfaatkan sebagai kampanye pasangan calon dalam mobilisasi/demobilisasi massa.

3) Pelembagaan abstention sebagai gerakan politik (ketidakhadiran pemilih) oleh aktor agama. Berkaitan dengan poin ketiga, penggunaan politik identitas dalam pilgub sumut mengadaptasi strategi-strategi politik dari pilgub Jakarta 2017, salah satunya bekerjanya ustadz sebagai aktor mobilisasi/demobilisasi massa. Pengajian menjadi instrumen yang digunakan dan sasaran yang efektif dari strategi ini adalah ibu-ibu

4) Track record pemerintahan selama ini mempengaruhi perilaku memilih. Hasil cross-tab data survei dengan merujuk kepada tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan di tiga level dengan potensi partisipasi dalam gelaran pemilu. Hasilnya menunjukkan perihal yang signifikan bahwa semakin rendah tingkat ketidakpuasan terhadap pemerintah maka semakin tinggi potensi partisipasi masyarakat dalam pemilu. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat ketidakpuasan terhadap pemerintah, semakin rendah potensi partisipasi masyarakat dalam pemilu.

5) Adanya cost of participation/voting (rasionalitas-ekonomi) yang mempengaruhi abstain voters. Argumentasi ini terbangun atas dasar persilangan data antara tingkatan pendapatan dengan jenis pekerjaan dalam mencari tingkatan potensi partisipasi masyarakat. Hasilnya menunjukkan secara signifikan bahwa tingkatan pendapatan dan jenis pekerjaan (kelas ekonomi) berpengaruh terhadap perilaku untuk memilih/tidak memilih. Mayoritas penduduk kota Medan akan cenderung untuk absen dalam memilih. Penduduk kota Medan akan cenderung untuk bekerja atas dasar pertimbangan ekonomi (mencari tambahan pendapatan) dibandingkan menghabiskan waktu untuk memilih.

6) Variabel ikatan-sosial berpengaruh terhadap hadirnya voters abstention. Penggalan data dilakukan dengan fokus terhadap preferensi tempat tinggal dengan potensi kehadiran pemilih dalam pemilu. Hasilnya menghasilkan premis: jika masyarakat berdomisili tempat tinggal satu etnis maka cenderung akan datang dalam pilgub. Sebaliknya, jika berdomisili berbeda etnis maka cenderung tidak datang dalam pilgub.

7) Bekerjanya variabel kampanye ataupun informasi baik dari kandidat, partai politik maupun KPU. Penyajian data berbasiskan pertanyaan: apakah responden berpartisipasi atau menghadiri sosialisasi pemilu, kampanye kandidat maupun oleh penyelenggara pemilu (KPU), serta apakah responden didatangi atau diajak oleh tim sukses atau simpatisan kandidat untuk datang ke TPS. Hasilnya adalah jika sosialisasi dilakukan lebih rutin baik oleh lembaga penyelenggara ataupun lembaga informal lainnya maka potensi partisipasi masyarakat semakin tinggi.

8) Adanya persoalan teknis-administrasi dalam bekerjanya abstain voters. Temuan riset menunjukkan pengetahuan tentang lokasi tempat TPS dan pengetahuan terkait dengan dengan DPT. Hasil analisisnya menunjukkan tentang potensi partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Beberapa poin besar di atas berpengaruh terhadap hadirnya voters abstention dalam pagelaran pilgub Sumut tahun 2018. Dari kacamata akademik, salah satu kelebihan dari kajian ini terkait dengan variabel tambahan bahwa persoalan institusional mendorong terhadap kemunculan voters abstention dimana mayoritas studi bertemakan abstain voters belum menganalisis secara mendalam terkait persoalan institusional ataupun memasukan persoalan institusional dalam analisisnya. Dari kacamata praktis, hasil riset ini berimplikasi terhadap

perbaiki sistem lembaga penyelenggara agar partisipasi masyarakat dalam pemilu baik daerah maupun nasional dapat meningkat.

## **2. Rekomendasi**

Persoalan partisipasi masyarakat menjadi persoalan nyata bagi lembaga penyelenggara pemilu khususnya di Kota Medan. Salah satu poin penting yang perlu menjadi perhatian seluruh pihak adalah kemampuan lembaga penyelenggara pemilu dalam mengelola partisipasi pemilih dan sikap negatif yang diperlihatkan masyarakat. Atas dasar itu, lembaga penyelenggara pemilu perlu untuk mendesain sistem sosialisasi yang efektif seperti durasi dan instrumen yang digunakan; memperhatikan permasalahan coklit; membangun kesepahaman antara institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu; serta merapikan data kependudukan dari institusi yang terlibat dalam pemilu (KPU, Capil dan sebagainya). Hal ini menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah dorongan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) – tidak hanya LSM yang bergerak dalam pemilu – untuk ajakan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Sebagai salah satu contoh, di kota Medan terdapat LSM yang bergerak di isu perempuan bernama Persada. Dalam gelaran pilgub Sumut 2018, LSM ini bergerak secara aktif untuk peningkatan partisipasi perempuan (utamanya ibu-ibu) mengingat isu politik identitas – pengajian oleh ustadz – yang dibawa oleh pasangan calon membawa implikasi cukup riskan terhadap angka partisipasi perempuan.

Dengan demikian, dalam tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kedua rekomendasi diatas diperuntukkan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pemilu. Peningkatan partisipasi masyarakat perlu menyentuh terhadap dua unsur yaitu institusi dan masyarakat. Apabila kedua unsur di atas dapat diperbaiki, maka bukan tidak mungkin angka partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat berada di angka partisipasi yang memuaskan.



## Daftar Pustaka

- Adams, J., Dow, J., & Merrill III, S. (2006). The Political Consequences of Alienation-Based And Indifference Based Voter Abstention: Applications To Presidential Elections. *Political Behavior Vol 28 No. 1*.
- Blais, A. (2006). Political Participation. In L. LeDuc, R. G. Niemi, & P. Norris, *Comparing Democracies 3: Elections and Voting in the 21st Century*. London: Sage Publications.
- Buehler, Michael and Tan, Paige. "Party-candidate Relationships in Indonesian Local Politics: A Case Study of the 2005 Regional Election in Gowa, South Sulawesi Province",. (2007). *Indonesia, 84*, 41-69.
- Choi, N. (2008). Elections, Parties, and Elites in Indonesia's Local Politics. *South East Asia Research 15(3)*, 325-354.
- Choi, N. (2009). Democracy and Patrimonial Politics in Local Indonesia. *Indonesia 88*, 131-164.
- Dalton, R. J. (2010). Ideology, Partisanship, and Democratic Development. In L. LeDuc, R. G. Niemi, & P. Norris, *Comparing Democracies 3: Elections and Voting in the 21st Century* (pp. 143-164). London: Sage Publications.
- Damanik, Agusssyah Ramadani. (2018). *Dinamika Validasi Data Pemilih Dan Partisipasi Pemilih Di Kota Medan*.
- Delwit, P. (2013). The End of Voters in Europe? Electoral Turnout in Europe since WWII . *Journal of Political Science Vol 3. No. 1*.
- Downs, A. (1957). The Causes and Effects of Rational Abstention. In A. Downs, *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper & Row .
- Erb, M., & Sulistiyanto, P. (2009 eds.). *Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders(Pilkada)*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Freixas, J., & Zwicker, W. S. (2003). Weighted Voting, Abstention And Multiple Levels of Approval. *Social Choice and Welfare Vol. 21 No.3*.
- Ghirardato, P., & Katz, J. N. (1999). Indecision Theory: Explaining Selective Abstention in Multiple Elections.
- Hanna, N. (2009). An Argument for Voting Abstention. *Public Affairs Quarterly, Vol 23 No 4*.

International IDEA. (2016). Voter Turnout Trends around the World. . Stockholm : International IDEA.

Kang, W. T. (2004). Protest Voting and Abstention Under Plurality Rule Elections. *Journal of Theoretical Politics*, Vol 16 No 1.

Matsusaka, J. G. (1993). Explaining Voter Turnout Patterns: An Information Theory. *Public Choice* Vol 84.

Palfrey, T., & Rosenthal, H. (1985). Voter Participation and Strategic Uncertainty. *The American Political Science Review*, Vol 79 No 1.

Plane, D. L., & Gershtenson, J. (2004). Candidates' ideological locations, abstention, and turnout in US midterm Senate elections. *Political Behavior*, 26(1), 69-93.

Power, T. J., & Roberts, T. (1995). Compulsory Voting, Invalid Ballots and Abstention in Brazil. *Political Research Quarterly*, Vol. 48 No. 4.

Tillman, E. R. (2008). Economic Judgments, Party Choice and Voter Abstention in Cross-National Perspective. *Comparative Political Studies*, Vol. 41 No. 9.

Trihartono, A. (2014). Beyond Measuring the Voice of the People: The Evolving Role of Political Polling in Indonesia's Local Leader Elections. *Southeast Asian Studies* 3 (1), 151- 182.

Lijphart, A. (1997). Unequal Participation: Democracy's Unresolved Dilemma. *The American Political Science Review*, Vol. 91, No. 1.

Lijphart, A. (1998). The Problem of Low and Unequal Voter Turnout – and What We Can Do About It. *Political Science Series* No 54.

Zipp, J. F. (1985). Perceived Representativeness and Voting: An Assessment of the Impact of "Choices" vs. "Echoes". *American Political Science Review*, 79(1), 50-61.

Sumber lainnya:

<https://www.liputan6.com/news/read/79528/kampanye-di-medan-dan-jambi-sepi>

<https://news.detik.com/berita/d-211454/panwaslu-sumut-temukan-sembilan-pelanggaran-pilpres>

<https://nasional.tempo.co/read/58553/pencalonan-kembali-walikota-medan-digoyang-mahasiswa>

<https://news.detik.com/berita/363812/calon-walikota-medan-kecam-camat-yang-dukung-saingannya>

<https://regional.kompas.com/read/2008/04/21/17580177/ratusan.massa.menuntut.pilkada.sumut.diulung>

<https://news.detik.com/berita/d-1317677/kpu-medan-tetapkan-10-pasangan-calon-walikota-2-dicoret-->

<http://www.tribunnews.com/election/2010/06/19/partisipasi-pemilih-pemilukada-medan-rendah>

<https://nasional.kompas.com/read/2010/06/24/22080657/pilkada.medan.diduga.curang.terstruktur>

<https://tekno.kompas.com/read/2013/01/06/15414572/pemilih.di.kota.medan.naik.160.686.orang>.

<http://kpud-sumutprov.go.id/?p=1231>

<https://pemilu.tempo.co/read/592992/panwaslu-medan-temukan-aneka-pelanggaran-masif>

<http://news.analisadaily.com/read/menakar-partisipasi-pemilih-pilkada-kota-medan/186262/2015/11/06> diakses pada tanggal 18 September 2018 pada pukul 20:29

<http://news.analisadaily.com/read/strategi-kpu-medan-tingkatkan-partisipasi-pemilih-di-pilgubsu-2018/478553/2018/01/01> diakses pada tanggal 19 September 2018 pada pukul 21:20

<https://www.inews.id/daerah/sumut/171465/kpu-medan-klaim-partisipasi-masyarakat-meningkat-di-pilgub-sumut-2018> diakses pada tanggal 19 September 2018 pada pukul 22:21

<http://medan.tribunnews.com/2015/12/16/partisipasi-pemilih-di-pilkada-medan-hanya-2538-persen> diakses pada tanggal 19 September 2018 pada pukul 19:21

<https://news.detik.com/berita/2192231/angka-golput-di-medan-dalam-pilgub-sumut-mencapai-6338-persen> diakses pada tanggal 18 September 2018 pada pukul 12:12

<https://news.detik.com/berita/d-2195547/tingkat-golput-dalam-pilgub-sumut-lebih-dari-50-persen> diakses pada tanggal 18 September 2018 pada pukul 10:35

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44601789> diakses pada tanggal 18 September 2018 pada pukul 11:22

<https://www.sumut24.co/partisipasi-pemilih-di-kota-medan-paling-rendah/> diakses pada tanggal 18 September 2018 pada pukul 19:00